

Makroekonomi Regional dan Industri Asuransi - Regional Sumatera

TIM PENULIS

Ibrahim Kholilul Rohman – Senior Research Associate IFG Progress / SKSG, Universitas Indonesia
(ibrahim.kholilul@ifg.id)

Nada Serpina – Research Associate IFG Progress
(nada.serpina@ifg.id)

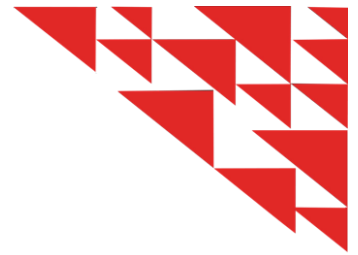
Dr. Paidi, S.E., M.Si. - Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Sumatera Utara
(paidi@usu.ac.id)

Christopher Lumbantobing - Mahasiswa Magister Ilmu Manajemen Universitas Sumatera Utara
(christopherrLt@gmail.com)

DAFTAR ISI

Executive Summary	2
Pendahuluan	4
Latar Belakang	4
Maksud dan Tujuan	2
Sasaran dan Keluaran	3
Ruang Lingkup	3
Literatur dan Metode	4
Teori Ekonomi Regional	4
Teori Permintaan dan Pertumbuhan Asuransi	4
Metode	5
Profil Ekonomi Regional	7
Gambaran Ekonomi Makro Regional	7
Kinerja Industri Asuransi Regional	17
Analisis <i>Linkage</i> antara Kinerja Makroekonomi Regional dengan Kinerja Industri Asuransi	26
Penutup	36
Kesimpulan	36
Rekomendasi	36
Ringkasan Strategi Industri Asuransi di Provinsi pada Pulau Sumatera	37

Executive Summary



Laporan ini disusun sebagai kerangka komprehensif dalam memetakan potensi ekonomi, dinamika sektoral, dan profil demografi di seluruh wilayah Sumatera. Fokus utama dari laporan ini adalah menyinergikan data makroekonomi dengan realitas kependudukan guna merumuskan arah kebijakan pengembangan industri keuangan dan perasuransian yang adaptif dan berbasis data (evidence-based policy). Berdasarkan hasil pemetaan, wilayah Sumatera menunjukkan ketahanan ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kekuatan ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, melainkan semakin bergeser pada kualitas transisi demografi. Struktur piramida penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif di hampir seluruh provinsi Sumatera merupakan Bonus Demografi yang menyimpan potensi pasar luar biasa sekaligus risiko sosial jika tidak dikelola melalui instrumen proteksi keuangan yang tepat.

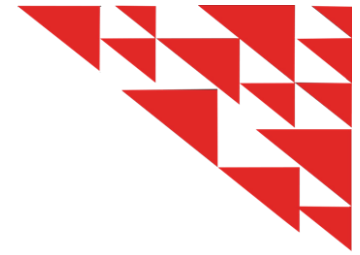
Laporan ini mengidentifikasi kontras yang tajam antarwilayah, mulai dari pusat industri eksportir dengan efisiensi risiko yang tinggi di Kepulauan Riau dan Riau hingga wilayah dengan basis populasi muda yang sangat besar, namun memiliki tantangan klaim jiwa yang signifikan seperti di Aceh. Ringkasan Eksekutif ini memberikan rekomendasi aksi strategis yang terdiferensiasi mencakup percepatan literasi digital hingga penguatan asuransi mikro bagi masyarakat agraris. Ringkasan Eksekutif ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peluang ekonomi regional Sumatera, memitigasi risiko kewilayahan, dan memastikan terciptanya ekosistem ekonomi yang inklusif, serta berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, Sumatera tidak hanya berperan sebagai lumbung komoditas, tetapi juga telah bertransformasi menjadi koridor industri pengolahan dan gerbang logistik internasional. Namun, dinamika ini tidak berjalan seragam. Terdapat disparitas yang signifikan antara provinsi-provinsi di pesisir timur yang berbasis industri dengan provinsi-provinsi di pesisir barat yang masih mengandalkan sektor agraris. Ketimpangan struktural ini menuntut sebuah analisis mendalam yang mampu membedah potensi wilayah secara lebih presisi.

Urgensi dari analisis ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa Pulau Sumatera tengah berada dalam fase transisi demografi. Struktur piramida penduduk di hampir seluruh provinsi di Sumatera menunjukkan penggelembungan pada kelompok usia produktif. Secara teoritis, kondisi Bonus Demografi ini merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, melimpahnya angkatan kerja merupakan mesin pertumbuhan ekonomi yang dahsyat bagi sektor manufaktur dan konsumsi domestik. Di sisi lain, tanpa adanya perlindungan finansial yang memadai dan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, bonus ini dapat berubah menjadi beban sosial, terutama terkait dengan risiko kesehatan dan pengangguran di masa depan.

Dalam industri asuransi, pemetaan profil demografi dan pertumbuhan ekonomi sektoral menjadi instrumen utama dalam melakukan manajemen risiko kewilayahan. Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sangat berkorelasi dengan karakteristik sektoral wilayahnya. Misalnya, penduduk di wilayah pusat industri, seperti Provinsi Kepulauan Riau dan Riau menunjukkan perilaku ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan penduduk di wilayah agraris seperti Jambi atau Bengkulu. Oleh karena itu, studi ini disusun untuk menjembatani celah informasi antara data makroekonomi, struktur kependudukan, dan performa industri asuransi. Dengan mengintegrasikan variabel demografi ke dalam analisis ekonomi regional, diharapkan akan lahir sebuah strategi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan ketahanan finansial masyarakat. Hal ini selaras dengan upaya penguatan stabilitas ekonomi regional yang inklusif, di mana setiap lapisan penduduk memiliki akses terhadap proteksi risiko yang adaptif terhadap karakteristik wilayah mereka masing-masing.

Pendahuluan



Latar Belakang

Industri asuransi merupakan salah satu pilar strategis dalam sistem perekonomian modern karena berperan sebagai mekanisme mitigasi dan transfer risiko yang mendukung stabilitas keuangan serta keberlanjutan aktivitas ekonomi. Melalui fungsi intermediasi risiko, sektor asuransi tidak hanya memberikan perlindungan bagi rumah tangga dan dunia usaha terhadap ketidakpastian, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan melalui pengelolaan dana jangka panjang. Dalam konteks ini, kinerja industri asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum, sangat dipengaruhi oleh dinamika kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, serta stabilitas sektor keuangan. Perubahan pada indikator-indikator tersebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, preferensi terhadap produk proteksi, kemampuan pembayaran premi, serta intensitas dan frekuensi klaim.

Di Indonesia, perkembangan industri asuransi menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir, namun tingkat penetrasi dan densitas asuransi masih relatif rendah dibandingkan negara *peers* di kawasan Asia. Hal ini mengindikasikan adanya ruang pertumbuhan yang signifikan, sekaligus tantangan struktural yang perlu diatasi, seperti rendahnya literasi keuangan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta keterbatasan akses terhadap produk asuransi di berbagai wilayah. Selain itu, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi juga menambah kompleksitas dalam pengelolaan risiko dan pengembangan produk asuransi yang sesuai.

Selama ini, sebagian besar analisis mengenai keterkaitan antara variabel makroekonomi dan kinerja industri asuransi dilakukan pada tingkat nasional. Pendekatan agregat tersebut cenderung mengabaikan heterogenitas kondisi ekonomi antar wilayah, padahal Indonesia memiliki disparitas regional yang cukup tinggi dalam hal struktur ekonomi, tingkat pembangunan, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Variasi ini berimplikasi pada perbedaan tingkat penetrasi asuransi, pola permintaan produk, hingga profil risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi di masing-masing daerah.

Wilayah Sumatera sebagai salah satu kawasan strategis di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terutama dari sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan. Namun demikian, struktur ekonomi di provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan keragaman yang cukup besar. Sebagai contoh, provinsi seperti Sumatera Utara memiliki struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi dengan kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan yang relatif kuat, sementara provinsi seperti Riau dan Sumatera Selatan lebih didominasi oleh sektor ekstraktif seperti minyak, gas, dan batubara. Perbedaan ini tidak

hanya memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga volatilitas pendapatan, tingkat risiko ekonomi, dan kapasitas masyarakat dalam mengakses serta memanfaatkan produk asuransi.

Selain faktor struktur ekonomi, indikator sosial ekonomi seperti tingkat pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan (*gini ratio*), serta kondisi ketenagakerjaan juga memainkan peran penting dalam menentukan permintaan terhadap produk asuransi. Daerah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan struktur ekonomi yang lebih formal cenderung memiliki tingkat penetrasi asuransi jiwa yang lebih besar, sementara daerah dengan dominasi sektor informal dan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi lebih rentan terhadap risiko tanpa perlindungan asuransi yang memadai. Di sisi lain, karakteristik risiko di wilayah Sumatera juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan lingkungan, termasuk potensi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan, yang berdampak signifikan terhadap klaim asuransi umum.

Kondisi lain yang menarik perhatian dalam perkembangan asuransi meliputi perkembangan infrastruktur, tingkat urbanisasi, serta penetrasi teknologi digital turut memengaruhi distribusi dan aksesibilitas produk asuransi di tingkat regional. Transformasi digital dalam industri keuangan membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan asuransi ke daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani, namun efektivitasnya tetap sangat bergantung pada kesiapan ekosistem ekonomi dan sosial di masing-masing wilayah. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, pendekatan analisis berbasis regional menjadi semakin relevan untuk memahami keterkaitan antara kondisi ekonomi daerah dan kinerja industri asuransi secara lebih komprehensif. Analisis ini tidak hanya mencakup hubungan antara variabel makroekonomi dengan pertumbuhan premi dan klaim, tetapi juga mempertimbangkan faktor struktural dan sosial ekonomi yang membentuk perilaku konsumen serta profil risiko di tingkat wilayah.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan strategi pengembangan industri asuransi yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah, termasuk dalam hal segmentasi pasar, inovasi produk, serta penguatan manajemen risiko berbasis wilayah. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memiliki relevansi akademik, tetapi juga nilai praktis yang tinggi bagi regulator, pelaku industri, serta pemerintah daerah dalam mendorong inklusi keuangan dan memperkuat ketahanan ekonomi regional di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera.

Maksud dan Tujuan

Kajian ini dilaksanakan dengan maksud menyusun kajian komprehensif mengenai kondisi dan driver ekonomi regional serta keterkaitannya dengan kinerja industri asuransi jiwa dan non-jiwa. Tujuan dari pelaksanaan kajian ini meliputi:

1. Mengidentifikasi struktur dan faktor penggerak utama ekonomi regional.
2. Mengidentifikasi pola konsumsi masyarakat dan pola aktivitas bisnis regional.
3. Menganalisis hubungan indikator makroekonomi daerah dengan premi dan klaim asuransi jiwa dan non-jiwa.
4. Mengidentifikasi potensi lini bisnis asuransi yang dapat berkembang pada daerah yang dianalisis.
5. Mengidentifikasi perbedaan pola keterkaitan antar wilayah berdasarkan struktur ekonomi dan sosial.

Sasaran dan Keluaran

Pelaksanaan kajian ini menasar untuk menghasilkan analisis dan keterkaitan antara indikator ekonomi regional dengan kinerja industri asuransi yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi pengembangan sektor asuransi berbasis wilayah.

Ruang Lingkup

Studi ini mengambil fokus pada analisis perekonomian regional di sepuluh provinsi yang berada pada Provinsi Sumatera Utara. Rentang periode data yang diambil adalah 5 tahun, mulai tahun 2020 sampai dengan 2025. Studi ini juga mengambil relevansi dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum.

Literatur dan Metode



Teori Ekonomi Regional

Konsep dalam ekonomi regional menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi terdistribusi secara spasial serta faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan ketimpangan antarwilayah. Dalam konteks kajian ini, pendekatan ekonomi regional penting untuk memahami heterogenitas struktur ekonomi daerah dan implikasinya terhadap sektor keuangan, termasuk industri asuransi.

Salah satu landasan utama adalah teori basis ekonomi (*economic base theory*) yang membedakan sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis menjadi penggerak utama pertumbuhan karena menghasilkan aliran pendapatan dari luar daerah. Dalam konteks Sumatera, sektor seperti perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan berperan sebagai sektor basis yang menentukan kapasitas ekonomi regional dan secara tidak langsung memengaruhi daya beli serta kebutuhan proteksi masyarakat.

Dalam konsep berkembang seperti aglomerasi dan klaster ekonomi, terjadi penekanan dalam konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu yang mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Wilayah dengan tingkat urbanisasi dan aglomerasi tinggi cenderung memiliki penetrasi asuransi yang lebih baik karena akses terhadap layanan keuangan lebih luas serta tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi.

Selain itu, pendekatan teori pertumbuhan endogen regional menyoroti pentingnya faktor internal seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan institusi dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Variabel-variabel ini berpengaruh terhadap stabilitas pendapatan dan risiko ekonomi rumah tangga maupun dunia usaha, yang pada akhirnya memengaruhi permintaan terhadap produk asuransi.

Dalam analisis empiris, teori ekonomi regional sering dioperasionalkan melalui indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur sektoral, serta faktor makro lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi pola keterkaitan antara struktur ekonomi daerah dengan dinamika sektor asuransi secara lebih kontekstual.

Teori Permintaan dan Pertumbuhan Asuransi

Permintaan terhadap asuransi secara teoritis didasarkan pada perilaku individu dan perusahaan dalam menghadapi risiko. Individu secara umum bersifat *risk-averse* sehingga secara teori akan cenderung membeli asuransi untuk memaksimalkan utilitas dengan mengurangi ketidakpastian akibat potensi kerugian di masa depan. Namun, kondisi ini secara realita tidak terjadi secara sempurna. Secara empiris, permintaan asuransi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tingkat pendapatan menjadi determinan utama dimana semakin tinggi

pendapatan, semakin besar kemampuan dan kecenderungan individu untuk membeli produk asuransi, khususnya asuransi jiwa. Selain itu, faktor sosio-ekonomi seperti tingkat pendidikan dan literasi keuangan memengaruhi pemahaman terhadap manfaat asuransi. Kondisi stabilitas ekonomi dan ekspektasi masa depan turut menentukan preferensi terhadap proteksi risiko.

Dalam konteks makro, pertumbuhan industri asuransi sering dikaitkan dengan variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong peningkatan premi melalui peningkatan pendapatan dan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat menekan daya beli dan meningkatkan klaim, khususnya pada asuransi umum. Suku bunga juga berperan dalam menentukan daya tarik produk asuransi berbasis investasi.

Terdapat perbedaan karakteristik utama dalam perasuransian, meliputi:

1. Asuransi jiwa, yang lebih sensitif terhadap faktor demografi, pendapatan jangka panjang, dan perencanaan keuangan; dan
2. Asuransi umum (non-jiwa), yang lebih dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi riil, kepemilikan aset, serta profil risiko seperti bencana dan kecelakaan.

Dalam konteks ekonomi regional, faktor-faktor tersebut berinteraksi dengan karakteristik lokal seperti struktur ekonomi, dominasi sektor informal, serta tingkat kerentanan terhadap risiko. Oleh karena itu, analisis permintaan dan pertumbuhan asuransi perlu mempertimbangkan dimensi spasial untuk menangkap variasi antar wilayah.

Metode

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan analisis deskriptif dan ekonometrika untuk mengidentifikasi keterkaitan antara ekonomi regional dan kinerja industri asuransi.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan merupakan data sekunder pada level regional (provinsi) di wilayah Pulau Sumatera, yang meliputi:

1. Indikator makroekonomi: pertumbuhan PDRB, inflasi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran;
2. Indikator sosial ekonomi: kemiskinan, ketimpangan, struktur tenaga kerja;
3. Data industri asuransi: premi dan klaim asuransi jiwa dan non-jiwa.

Pendekatan Analisis

Analisis dilakukan dalam beberapa tahapan:

1. Analisis Deskriptif Regional

Pendekatan ini berupaya untuk mengidentifikasi struktur ekonomi, sektor unggulan, dan profil sosial ekonomi masing-masing wilayah.

2. Analisis Keterkaitan (*Correlation / Comparative Analysis*)

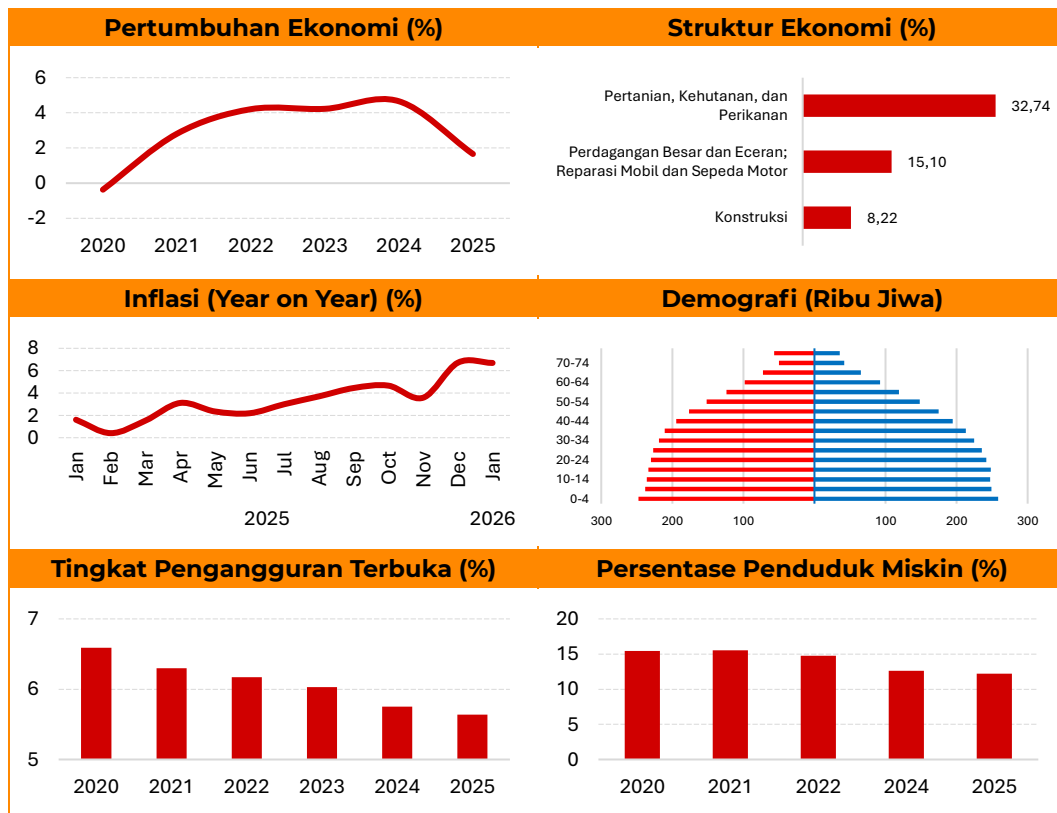
Pendekatan ini berupaya untuk mengkaji hubungan awal antara variabel ekonomi regional dengan indikator kinerja asuransi.

Profil Ekonomi Regional

Gambaran Ekonomi Makro Regional

Kondisi makroekonomi Pulau Sumatera terdiversifikasi, di mana setiap wilayah memiliki karakteristik pertumbuhan dan risiko yang berbeda. Sebagai salah satu pilar penopang perekonomian nasional, perekonomian Sumatera digerakkan oleh Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pertanian, dan Sektor Perdagangan. Kondisi makroekonomi masing-masing provinsi sebagai berikut:

Provinsi Aceh



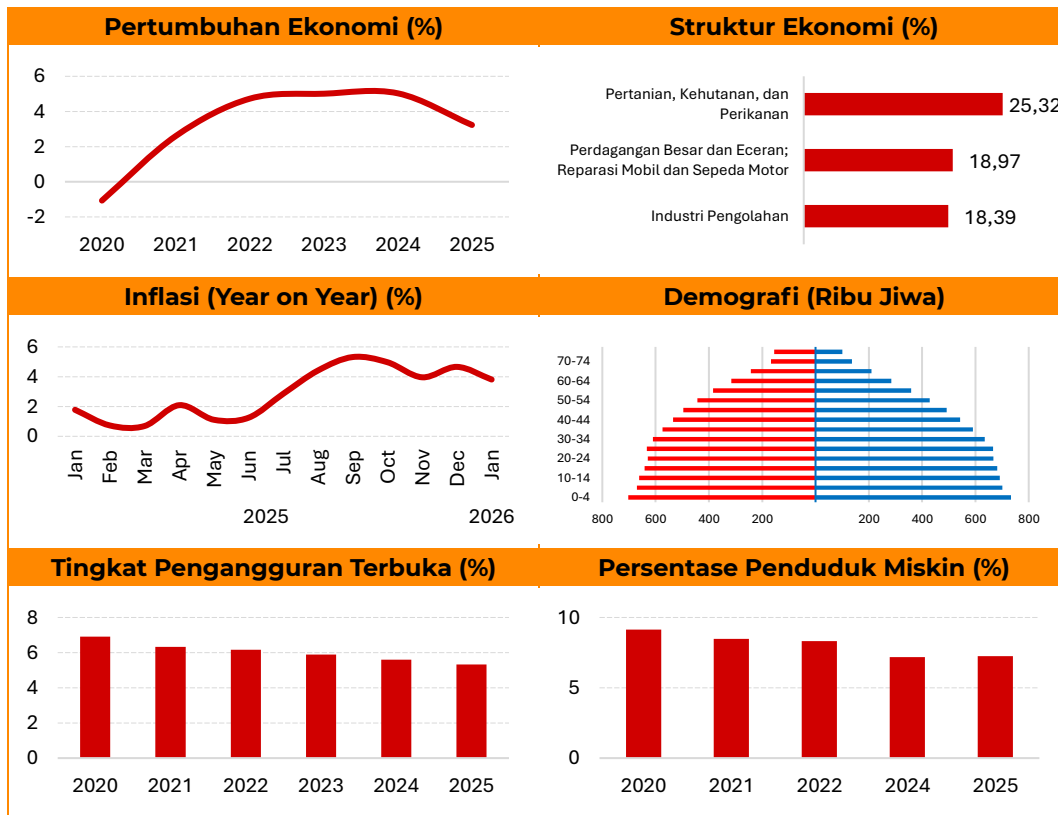
Gambar 1 Kondisi Makroekonomi Provinsi Aceh

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2026)

Provinsi Aceh berhasil bangkit dari kontraksi ekonomi akibat pandemi, meskipun momentum pertumbuhannya melambat menjadi 1,66% pada tahun 2025. Dari sisi kesejahteraan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara konsisten membaik hingga menyentuh 5,64% yang sejalan dengan angka kemiskinan yang juga turun menjadi 12,22% pada 2025. Meskipun trennya positif, angka kemiskinan ini masih tergolong tinggi.

Perekonomian Aceh sangat bergantung pada sektor primer, di mana kontribusi Sektor Pertanian terus meningkat hingga mencapai 32,74% di 2025. Minimnya industrialisasi membuat Aceh kesulitan menciptakan lapangan kerja bernilai tambah tinggi sehingga pengentasan kemiskinan berjalan lambat meski pengangguran menurun. Secara demografis, Aceh berada dalam fase ekspansif dengan dasar piramida penduduk yang sangat lebar yang mencerminkan tingginya proporsi penduduk usia 0-14 tahun.

Provinsi Sumatera Utara

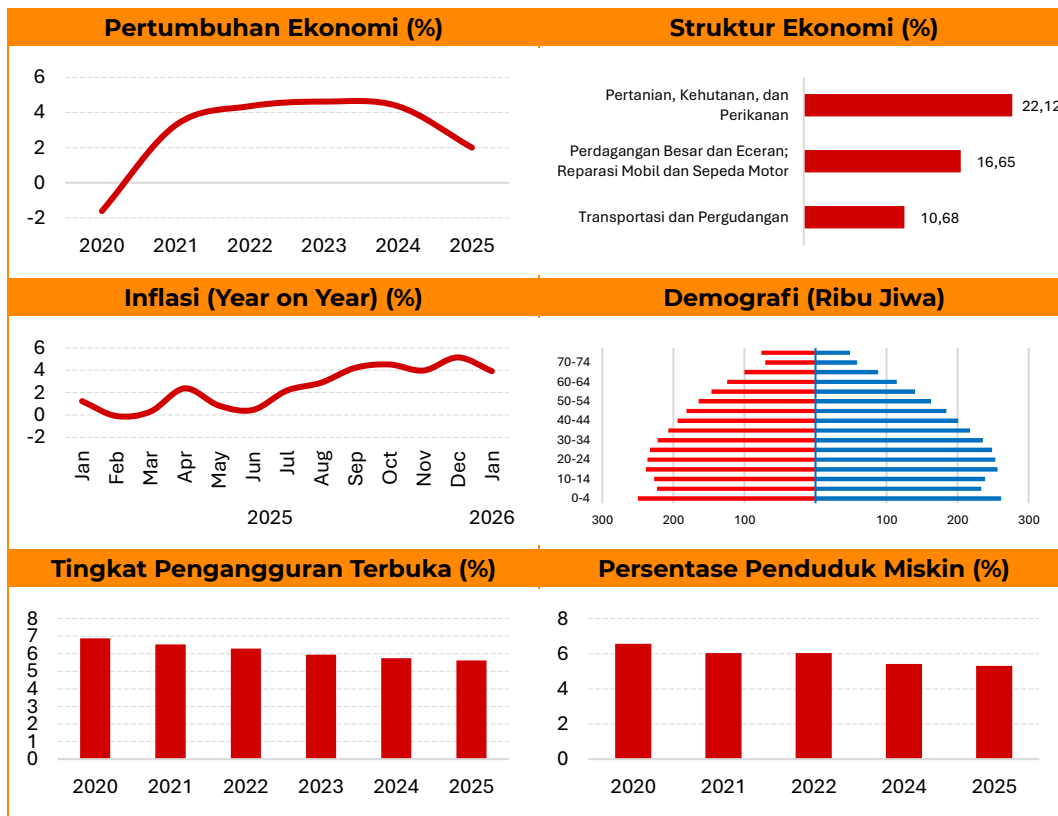


Gambar 2 Kondisi Makroekonomi Provinsi Sumatera Utara

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2026)

Sumatera Utara memiliki kinerja pemulihan ekonomi yang sangat baik dengan pertumbuhan yang stabil di kisaran 5%, meskipun sedikit menurun menjadi 3,23% pada tahun 2025. Kinerja ekonomi ini berdampak sangat positif pada indikator sosial yang dapat dilihat dari TPT turun dari angka 6,91% di 2020 menjadi 5,32% pada 2025, dan kemiskinan berhasil ditekan hingga 7,24% pada tahun 2025. Kekuatan utama provinsi ini terletak pada struktur ekonominya yang terdiversifikasi dengan baik. Pada tahun 2025, Sektor Pertanian (25,32%), Industri Pengolahan (18,39%), dan Perdagangan (18,97%) memberikan kontribusi yang relatif seimbang. Keseimbangan ini menciptakan ketahanan ekonomi (resiliensi) yang kuat terhadap guncangan eksternal sekaligus mampu menyerap tenaga kerja di berbagai tingkat keterampilan. Sumatera Utara saat ini berdiri sebagai episentrum bonus demografi di Sumatera dengan konsentrasi penduduk usia 20-39 tahun.

Provinsi Sumatera Barat

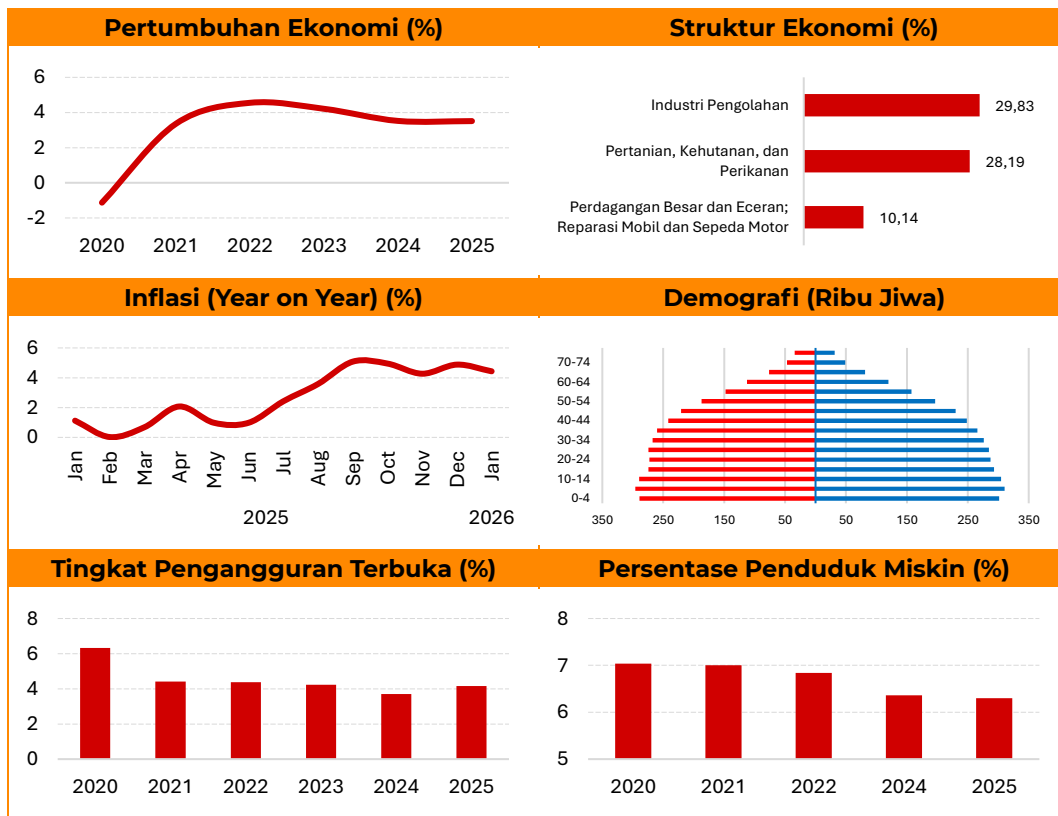


Gambar 3 Kondisi Makroekonomi Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2026)

Provinsi Sumatera Barat menunjukkan resiliensi ekonomi yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dan sektor UMKM yang dominan. Dari tahun 2020 hingga 2025, Sumatera Barat mencatatkan tren pertumbuhan ekonomi yang stabil namun cenderung moderat, ditutup pada angka 2,00% di 2025. Pada tahun 2025, TPT berhasil ditekan ke angka 5,62%, dan yang paling impresif, tingkat kemiskinan berada di level yang sangat rendah yaitu 5,31%. Struktur perekonomian Provinsi Sumatera Barat ditopang oleh Sektor Pertanian (22,12%) dan Perdagangan (16,65%), dan Transportasi & Pergudangan (10,68%). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Sumatera Barat tidak memiliki mesin industri besar yang memacu pertumbuhan tinggi, pemerataan ekonomi melalui sektor perdagangan dan pertanian skala kerakyatan berjalan dengan efektif dalam menjaga masyarakat dari garis kemiskinan.

Provinsi Riau

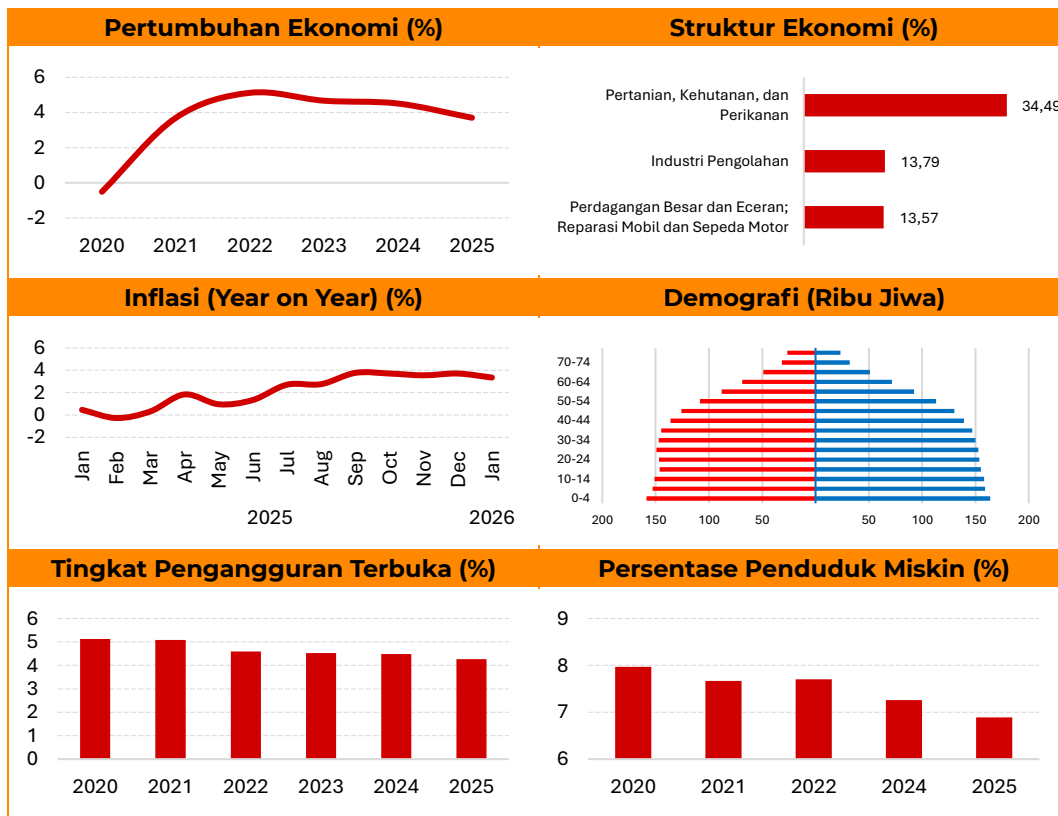


Gambar 4 Kondisi Makroekonomi Provinsi Riau

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2026)

Riau menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi sepanjang 2020–2025 dengan capaian akhir sebesar 3,51% pada tahun 2025. Meskipun pertumbuhannya melandai, provinsi ini berhasil mencatatkan penurunan TPT yang luar biasa yang menyentuh angka 4,16% di 2025. Tingkat kemiskinan pun relatif rendah, berada di 6,30% pada tahun 2025. Provinsi Riau merupakan wilayah agro-industri. Pada tahun 2025, Industri Pengolahan (29,83%) dan Pertanian (28,19%) mendominasi perekonomian. Besarnya porsi industri pengolahan menciptakan nilai tambah ekonomi, menyerap tenaga kerja secara optimal, dan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat di level yang tinggi. Provinsi Riau memiliki struktur penduduk yang kokoh pada kelompok usia produktif dewasa yang memiliki stabilitas penghasilan relatif tinggi.

Provinsi Jambi

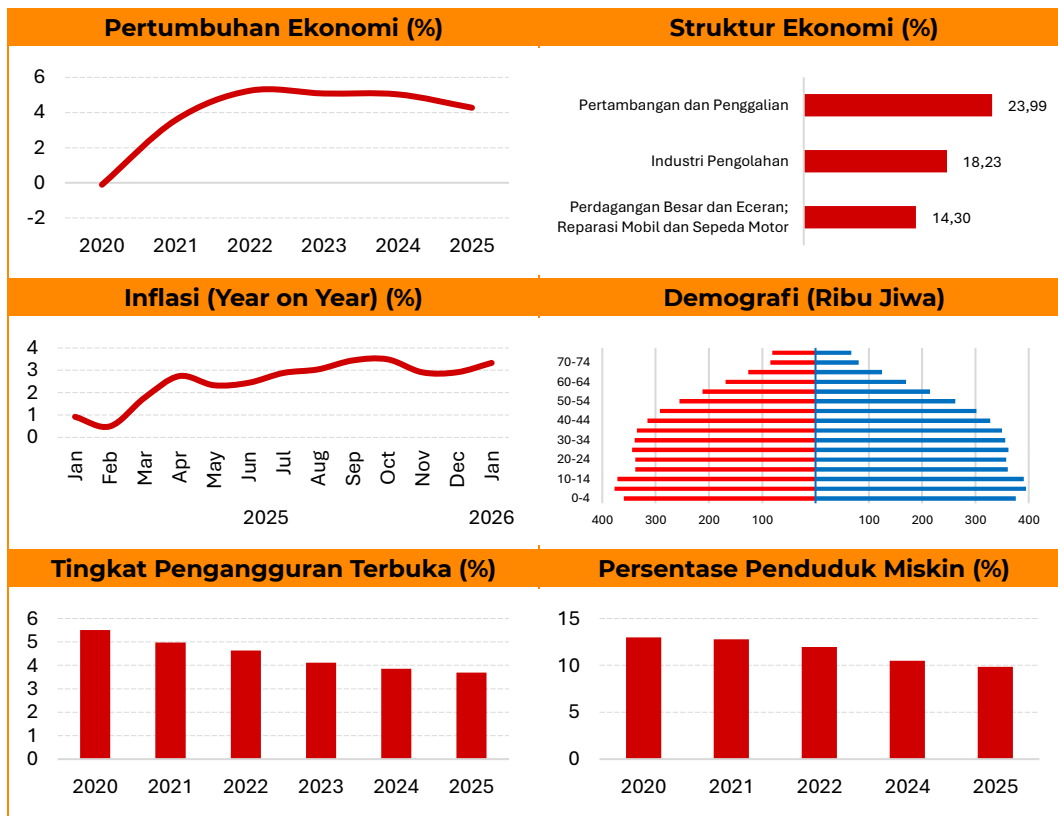


Gambar 5 Kondisi Makroekonomi Provinsi Jambi

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2026)

Provinsi Jambi mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tangguh sepanjang periode evaluasi dengan angka 3,70% pada tahun 2025. Stabilitas ekonomi ini berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan sosial yang signifikan, di mana TPT menurun menjadi 4,26% dan kemiskinan turun ke 6,89% di akhir tahun 2025. Secara struktur perekonomian, Jambi adalah provinsi agraris dengan kontribusi sektor pertanian yang sangat dominan, bahkan terus meningkat hingga menyentuh 34,49% pada 2025. Tingginya porsi pertanian di Jambi yang dipadukan dengan industri pengolahan (13,79%) dan perdagangan (13,57%) menjadi bantalan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan secara efisien. Secara demografis, Jambi memiliki struktur penduduk dengan proporsi angkatan kerja produktif yang besar di sektor perkebunan monokultur yang menyebabkan daya beli masyarakat sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Provinsi Sumatera Selatan

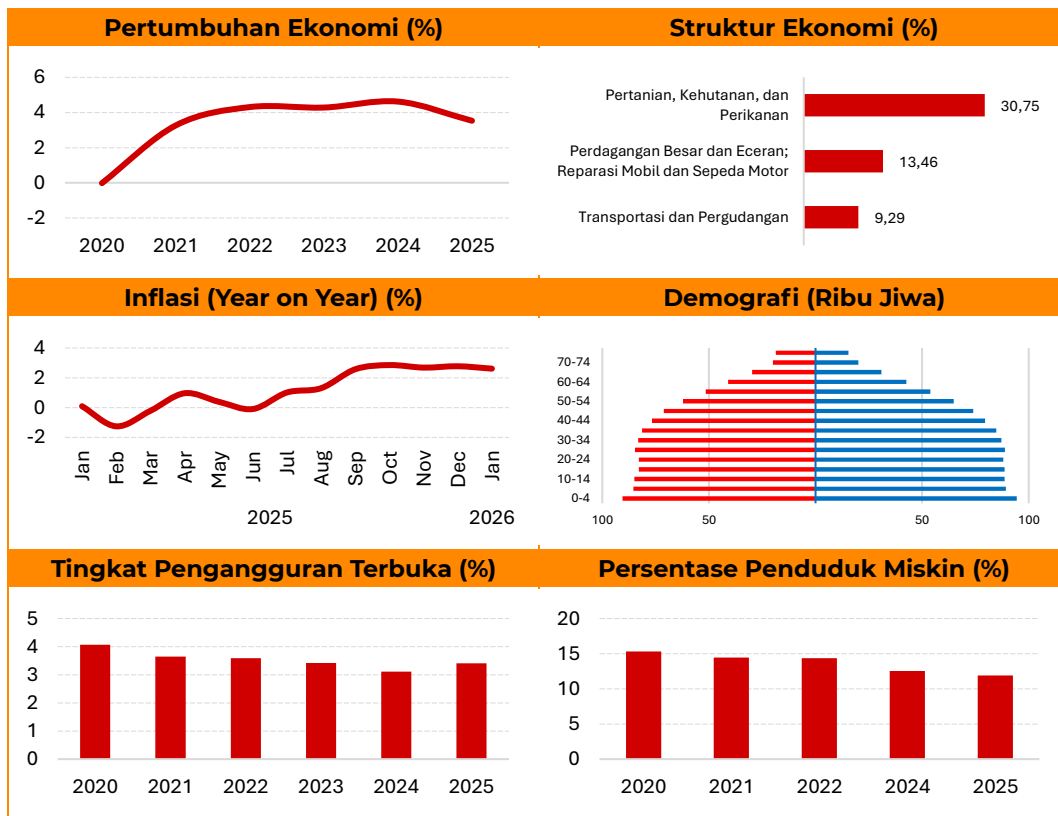


Gambar 6 Kondisi Makroekonomi Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2026)

Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan melampaui angka 5%, meskipun menurun di 4,27% pada 2025. Pertumbuhan ini diikuti oleh penurunan angka TPT yang impresif menjadi hanya 3,69% di akhir periode. Namun, meski kemiskinan turun dari belasan persen di awal pandemi, angkanya masih cukup tinggi sebesar 9,85% pada tahun 2025. Analisis struktural pada 2025 menunjukkan ekonomi yang sangat bergantung pada Sektor Industri Pengolahan (18,23%), Perdagangan (14,30%), namun Sektor Pertanian (13,93%) termasuk yang terendah di Sumatera selain Kepulauan Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor industri pertumbuhan dan menyerap pekerja formal, masih ada ketimpangan (*inequality*) atau kurangnya lapangan kerja inklusif di pedesaan yang menyebabkan angka kemiskinan sulit turun ke level yang lebih rendah. Secara demografis, provinsi ini memiliki angkatan kerja yang stabil. Kondisi kependudukan yang mulai memasuki fase produktif dewasa memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan instrumen keuangan jangka panjang.

Provinsi Bengkulu

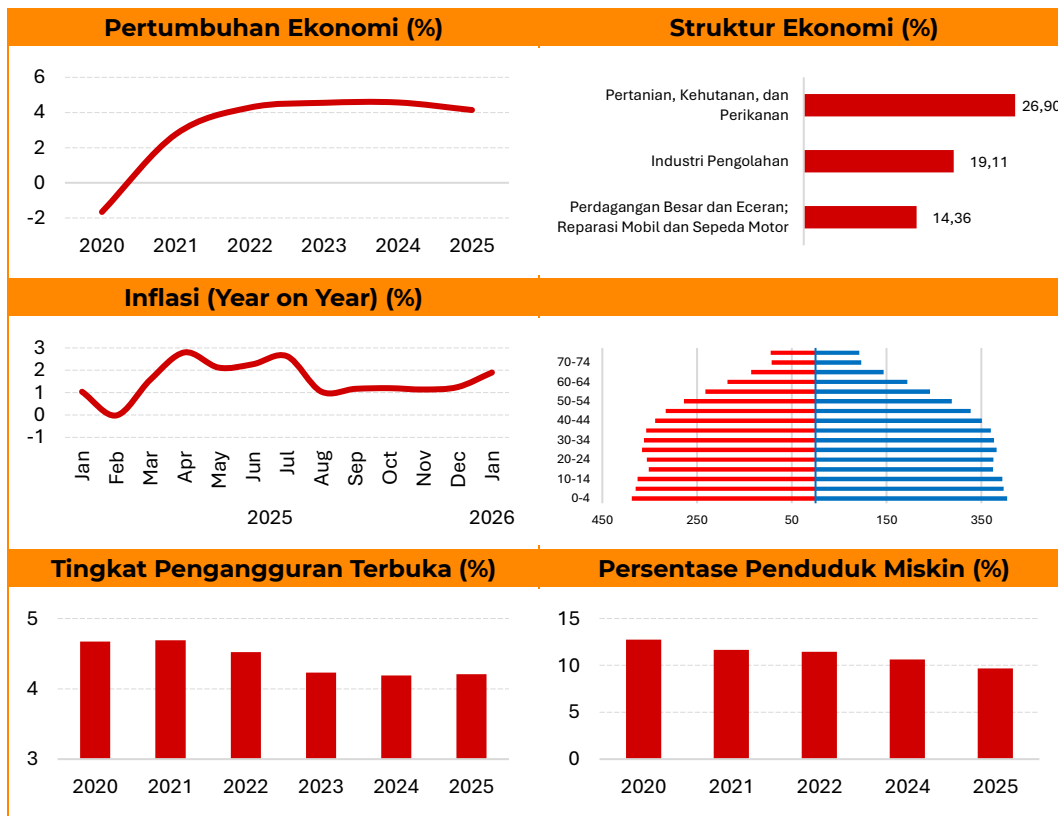


Gambar 7 Kondisi Makroekonomi Provinsi Bengkulu

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2026)

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama periode 2020–2025, ditutup pada 3,53% di 2025. Pencapaian paling menonjol dari provinsi ini adalah kemampuannya menekan TPT dari atas 4% menjadi hanya 3,41% pada 2025. Namun, rendahnya pengangguran ini tidak sejalan dengan angka kemiskinan yang justru masih tinggi di angka 11,88% pada tahun 2025. Provinsi Bengkulu sangat bergantung pada sektor pertanian (30,75%). Kondisi ini menciptakan fenomena *working poor* (pekerja miskin), di mana masyarakat pedesaan tetap bekerja, namun terjebak dalam pekerjaan sektor pertanian informal yang berproduktivitas rendah dan tidak memberikan pendapatan yang cukup untuk keluar dari kemiskinan. Struktur penduduk Bengkulu masih bersifat ekspansif dengan dominasi kelompok usia anak-anak yang masif pada dasar piramida penduduk yang mencerminkan potensi angkatan kerja besar di masa depan namun memiliki beban ketergantungan tinggi saat ini.

Provinsi Lampung

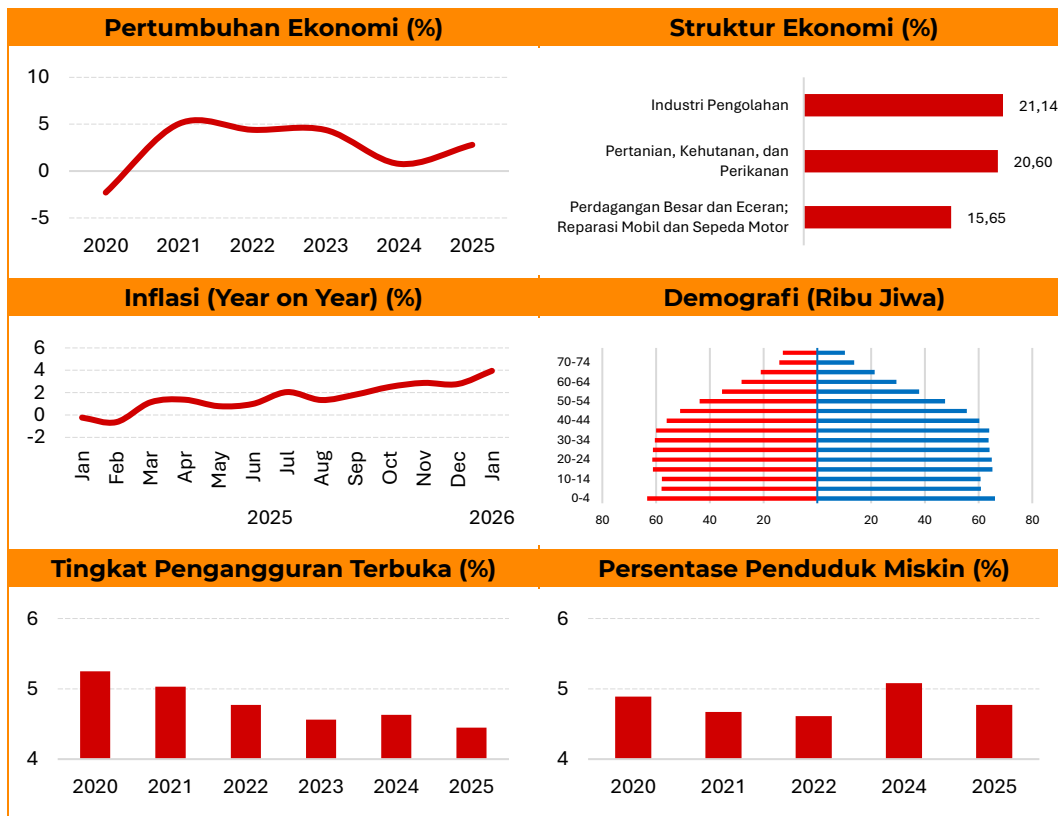


Gambar 8 Kondisi Makroekonomi Provinsi Lampung

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2026)

Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan yang baik sebelum mengalami sedikit deselerasi ke angka 4,14% di tahun 2025. Tren ketenagakerjaan berangsur membaik dengan TPT yang turun stabil ke angka 4,21% pada tahun 2025. Keberhasilan terbesar Provinsi Lampung adalah kemampuannya menurunkan angka kemiskinan secara konsisten dari nyaris 12,76% pada tahun 2020 menjadi 9,66% pada tahun 2025. Provinsi Lampung merupakan gerbang utama logistik yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Analisis struktur sektoralnya pada 2025 menunjukkan fondasi ekonomi riil yang sangat kokoh. Provinsi Lampung didominasi oleh Sektor Pertanian (26,90%), Sektor Industri Pengolahan (19,11%), dan Sektor Perdagangan (14,36%). Sinergi yang kuat antara sektor hulu dan sektor hilir menciptakan rantai pasok lokal yang luas, menyerap banyak tenaga kerja, dan secara efektif mengangkat masyarakat dari garis kemiskinan. Struktur penduduk Lampung didominasi oleh kelompok usia produktif muda yang terlibat aktif dalam mobilitas arus barang dan jasa antar-pulau.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

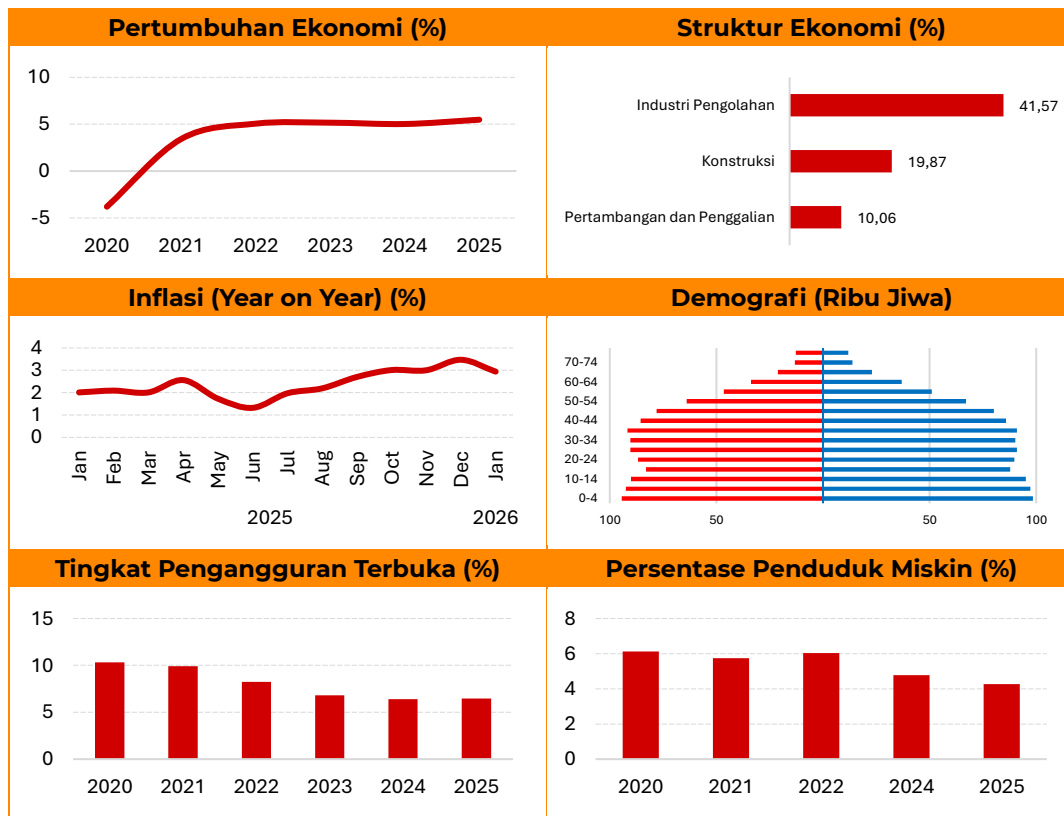


Gambar 9 Kondisi Makroekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2026)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling bergejolak selama 2020–2025, bahkan sempat anjlok ke pertumbuhan 0,77% pada tahun 2024, kemudian meningkat ke 2,80% pada tahun 2025. TPT juga mengalami fluktuasi namun berakhir membaik di 4,45% pada 2025. Terlepas dari ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan di provinsi ini sangat rendah dan terjaga di angka 4,77% pada tahun 2025. Struktur ekonomi pada 2025 cukup berimbang antara Sektor Industri Pengolahan (21,14%), Pertanian (20,60%), dan Perdagangan (15,65%). Fluktuasi ekonomi provinsi ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas global. Namun, karena populasinya relatif kecil dan basis pendapatan masyarakat dari komoditas ini cukup tinggi, gejolak pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menjatuhkan kesejahteraan sosial masyarakatnya ke bawah garis kemiskinan.

Provinsi Kepulauan Riau



Gambar 10 Kondisi Makroekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah, 2026)

Provinsi Kepulauan Riau mengalami pemulihan pasca-pandemi yang paling agresif dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi sebesar 5,48% pada tahun 2025. Provinsi ini juga berhasil menangani masalah pengangguran struktural akibat pandemi secara efektif. TPT sempat menembus 10% di 2020 berhasil dipangkas signifikan menjadi 6,45% pada 2025. Sebagai hasilnya, persentase kemiskinannya adalah yang terendah di seluruh Sumatera, yakni hanya sebesar 4,26% pada 2025. Secara struktur perekonomian, Sektor Industri Pengolahan mendominasi perekonomian secara mutlak (41,57%), Sektor Perdagangan (19,87%), dan Sektor Pertambangan dan Penggalian (10,06%). Hal ini mengukuhkan status Kepulauan Riau sebagai pusat manufaktur berorientasi ekspor yang berdaya saing tinggi yang mampu menciptakan *trickle-down effect* yang kuat sehingga menghasilkan standar kesejahteraan terbaik di kawasan ini. Secara demografi, gembung ekstrem terjadi pada kelompok usia 25-39 tahun yang menandakan banyaknya penduduk usia produktif di provinsi tersebut.

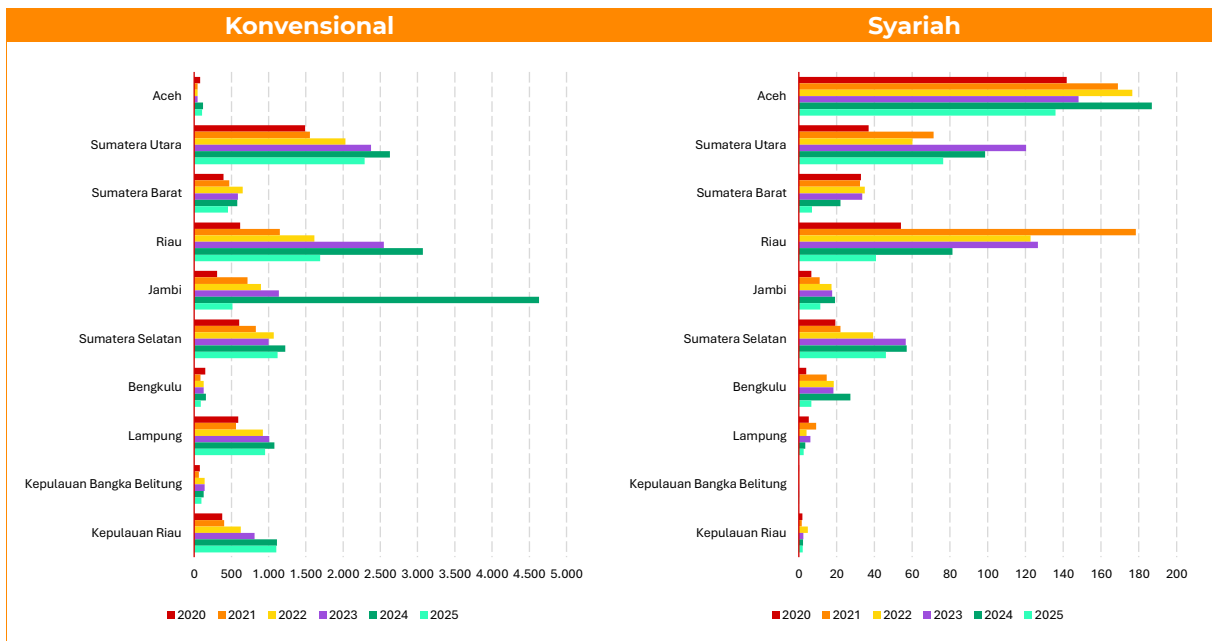
Kinerja Industri Asuransi Regional

Kinerja industri asuransi di Pulau Sumatera mencerminkan tingkat kematangan ekosistem keuangan serta kesadaran masyarakat terhadap manajemen risiko. Sebagai instrumen perlindungan finansial, asuransi memainkan peran ganda, yaitu memberikan jaring pengaman bagi rumah tangga dan pelaku usaha dari ketidakpastian, sekaligus bertindak sebagai investor institusional yang menyalurkan premi masyarakat ke dalam pembangunan ekonomi regional. Analisis kinerja industri ini menjadi sangat krusial di wilayah Sumatera yang memiliki kerentanan bencana tinggi dan ketergantungan ekonomi pada sektor komoditas yang fluktuatif.

Premi Asuransi Umum dan Jiwa per Wilayah

Kapasitas pasar asuransi umum dalam menyerap premi, baik melalui model konvensional maupun syariah mencerminkan keragaman preferensi masyarakat dan pelaku usaha dalam memilih instrumen perlindungan finansial. Di tengah upaya penguatan stabilitas ekonomi regional, tren pertumbuhan premi asuransi umum menjadi parameter penting untuk melihat sejauh mana sektor-sektor strategis, seperti manufaktur, logistik, dan perdagangan telah mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam struktur biaya.

Penyajian data berikut membandingkan performa premi asuransi umum konvensional dan syariah di sepuluh provinsi Sumatera untuk periode 2020–2025. Perbandingan ini memberikan gambaran spasial mengenai dominasi volume pasar di wilayah-wilayah berbasis komoditas dibandingkan dengan pertumbuhan asuransi berbasis prinsip syariah. Analisis terhadap premi ini bertujuan untuk memetakan konsentrasi risiko serta mengidentifikasi peluang penetrasi pasar baru, khususnya pada wilayah yang menunjukkan tren pertumbuhan positif namun masih memiliki skala nominal yang relatif kecil dibandingkan potensi ekonomi daerahnya.



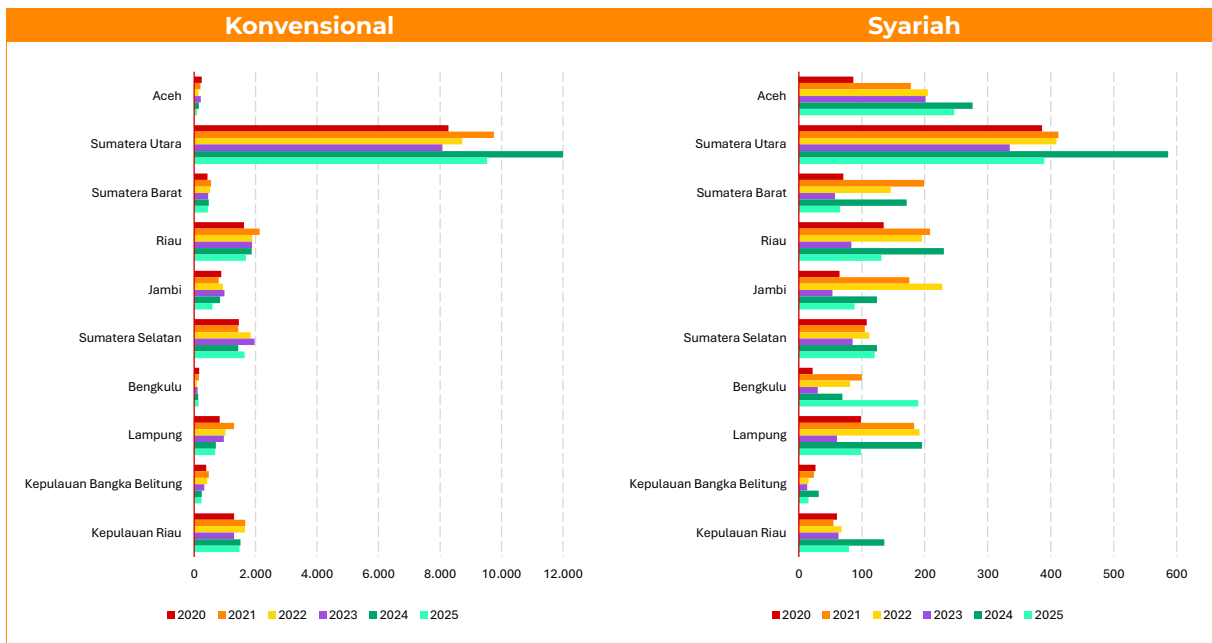
Gambar 11 Perkembangan Premi Asuransi Umum di Pulau Sumatera (Rp Miliar)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan gambar tersebut, sektor konvensional menunjukkan dominasi nilai nominal yang sangat besar dengan fluktuasi yang tajam, terutama di wilayah kaya komoditas. Jambi mencatatkan lonjakan premi pada tahun 2024 menembus angka di atas Rp 4.500 miliar yang mengindikasikan adanya penutupan polis aset industri atau proyek strategis berskala besar dalam periode tersebut. Sementara itu, Riau dan Sumatera Utara tetap stabil dengan nilai premi di kisaran Rp 1.500 hingga Rp 3.000 miliar, mencerminkan tingginya ketergantungan sektor korporasi dan industri pengolahan di wilayah daratan terhadap perlindungan aset konvensional.

Sektor asuransi umum syariah memiliki skala pasar yang jauh lebih ceruk (*niche*) dengan nilai nominal di bawah Rp 200 miliar, namun menunjukkan pola lokalisasi yang kuat. Aceh mendominasi pasar syariah dengan pertumbuhan yang agresif hingga mencapai hampir Rp 190 miliar pada tahun 2024 yang didorong oleh penerapan regulasi ekonomi syariah setempat. Di luar Aceh dan Riau, penetrasi asuransi syariah di provinsi lain, seperti Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau masih sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi atau ketersediaan produk syariah yang mampu bersaing dengan dominasi sektor konvensional di wilayah pusat perdagangan kepulauan.

Berbeda dengan asuransi umum yang lebih berorientasi pada perlindungan aset fisik, asuransi jiwa berkaitan erat dengan perencanaan hari tua, dana pendidikan, dan jaring pengaman ekonomi keluarga. Oleh karena itu, tren pertumbuhan premi di sektor ini menjadi cerminan dari kondisi kesejahteraan rumah tangga dan stabilitas pendapatan masyarakat di tingkat regional.



Gambar 12 Perkembangan Premi Asuransi Jiwa di Pulau Sumatera (Rp Miliar)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

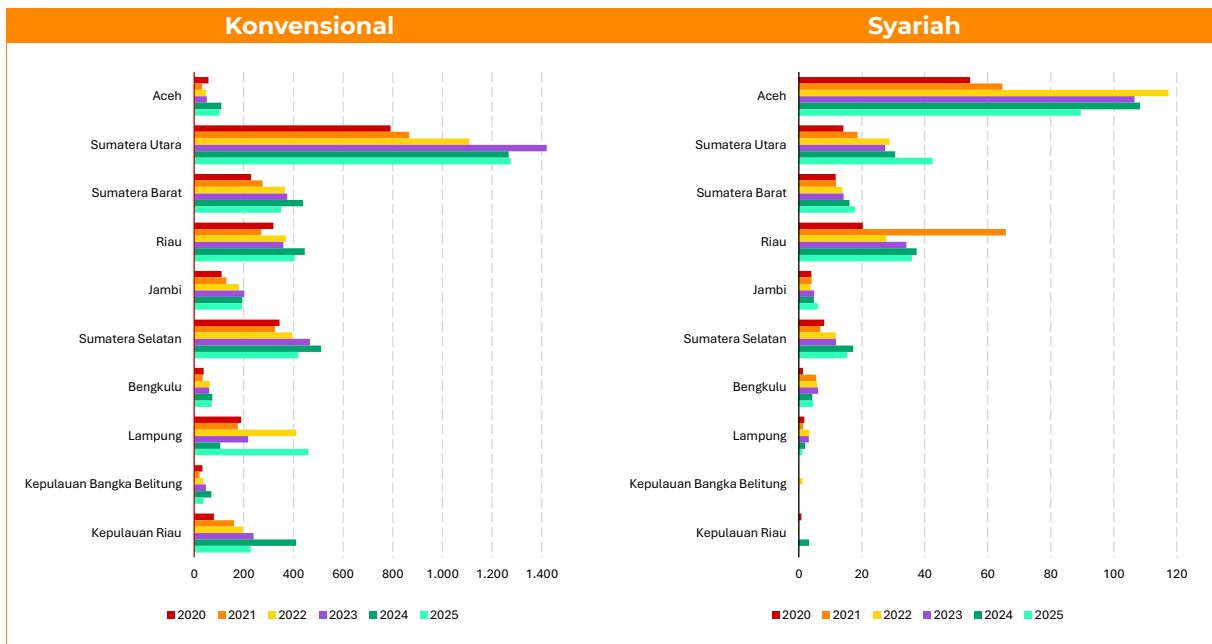
Struktur pasar asuransi jiwa di Sumatera masih bersifat sentralistik, di mana Sumatera Utara menguasai lebih dari 60% total premi regional baik di jalur konvensional maupun syariah. Sementara itu, asuransi syariah

mulai menemukan basis pertumbuhan yang kuat di wilayah dengan karakteristik regulasi khusus seperti Aceh. Perbedaan skala yang besar ini menunjukkan bahwa asuransi jiwa syariah masih berada pada fase pertumbuhan awal yang memiliki ruang ekspansi sangat luas, terutama jika mampu menjangkau segmen masyarakat di wilayah kepulauan yang saat ini masih memiliki angka premi sangat minimal.

Klaim Asuransi Umum dan Jiwa per Wilayah

Realisasi klaim merupakan perwujudan dari komitmen industri asuransi dalam memberikan perlindungan nyata kepada pemegang polis. Tingginya klaim di wilayah tertentu tidak selalu mengindikasikan kinerja negatif, melainkan menunjukkan efektivitas fungsi proteksi asuransi dalam menjaga stabilitas keuangan masyarakat saat terjadi risiko sehingga mencegah penurunan kesejahteraan yang lebih dalam akibat guncangan ekonomi mendadak.

Penyajian data klaim berikut memetakan beban risiko yang ditanggung oleh penyedia asuransi konvensional dan syariah di sepuluh provinsi Sumatera sepanjang periode 2020–2025. Analisis terhadap angka klaim ini, dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan tingkat eksposur risiko tinggi yang membutuhkan penguatan strategi mitigasi atau penyesuaian model bisnis asuransi.



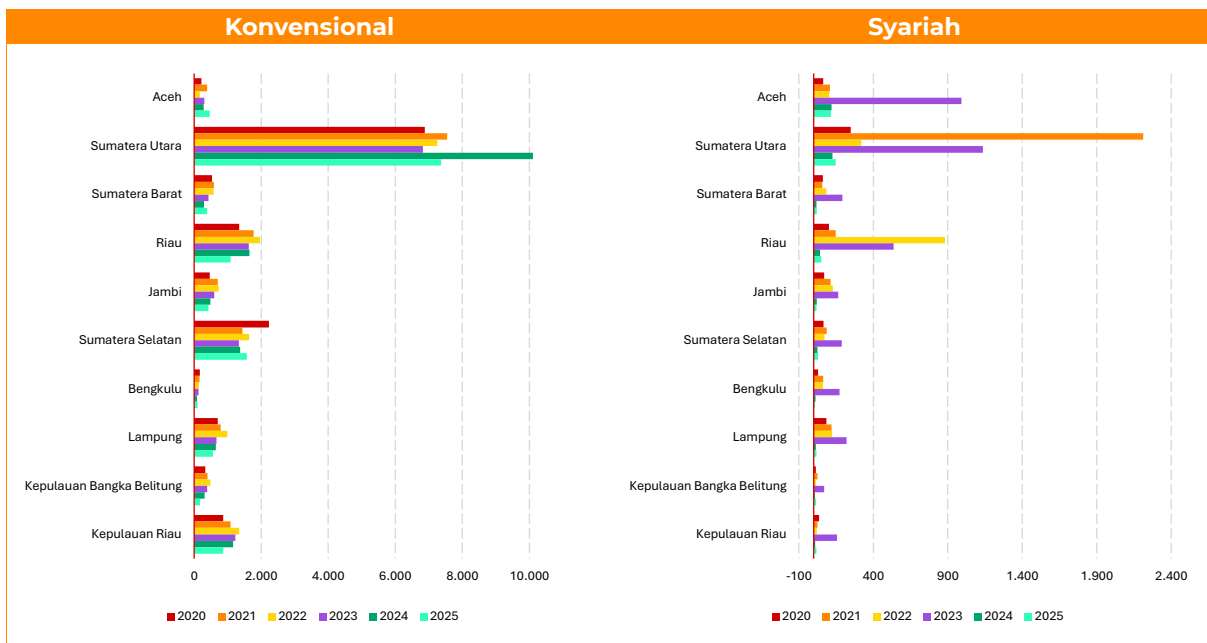
Gambar 13 Perkembangan Klaim Asuransi Umum di Pulau Sumatera (Rp Miliar)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Realisasi klaim asuransi umum konvensional di Pulau Sumatera mencerminkan distribusi risiko yang sangat dinamis, di mana Sumatera Utara tetap menjadi wilayah dengan beban klaim tertinggi yang menembus angka Rp 1.400 miliar pada puncaknya di tahun 2023. Tingginya angka klaim ini berkorelasi dengan aktivitas industri dan manufaktur yang masif di wilayah tersebut. Sementara itu, provinsi lain seperti Riau, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau menunjukkan pola klaim yang relatif stabil dan terjaga di kisaran Rp 200 hingga Rp

450 miliar. Sumatera Barat mencatatkan tren kenaikan klaim yang konsisten hingga tahun 2024 yang mengindikasikan adanya peningkatan kejadian risiko atau peningkatan kesadaran klaim di sektor properti dan kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

Pada asuransi umum syariah, realisasi klaim menunjukkan skala yang jauh lebih kecil, namun memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat progresif di wilayah tertentu. Aceh mendominasi pembayaran klaim syariah dengan nilai yang melonjak signifikan hingga mendekati Rp 120 miliar pada tahun 2022 sebelum stabil di angka tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menegaskan bahwa model asuransi syariah telah menjadi pilar perlindungan utama bagi masyarakat Aceh. Di sisi lain, Riau juga menunjukkan fluktuasi klaim syariah yang cukup dinamis, di mana sempat mencapai puncak di tahun 2021 sebelum menunjukkan tren penurunan. Rendahnya klaim syariah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau selaras dengan rendahnya perolehan premi di wilayah tersebut menandakan pasar asuransi umum syariah di zona kepulauan masih berada pada tahap penetrasi awal.



Gambar 14 Perkembangan Klaim Asuransi Jiwa di Pulau Sumatera (Rp Miliar)

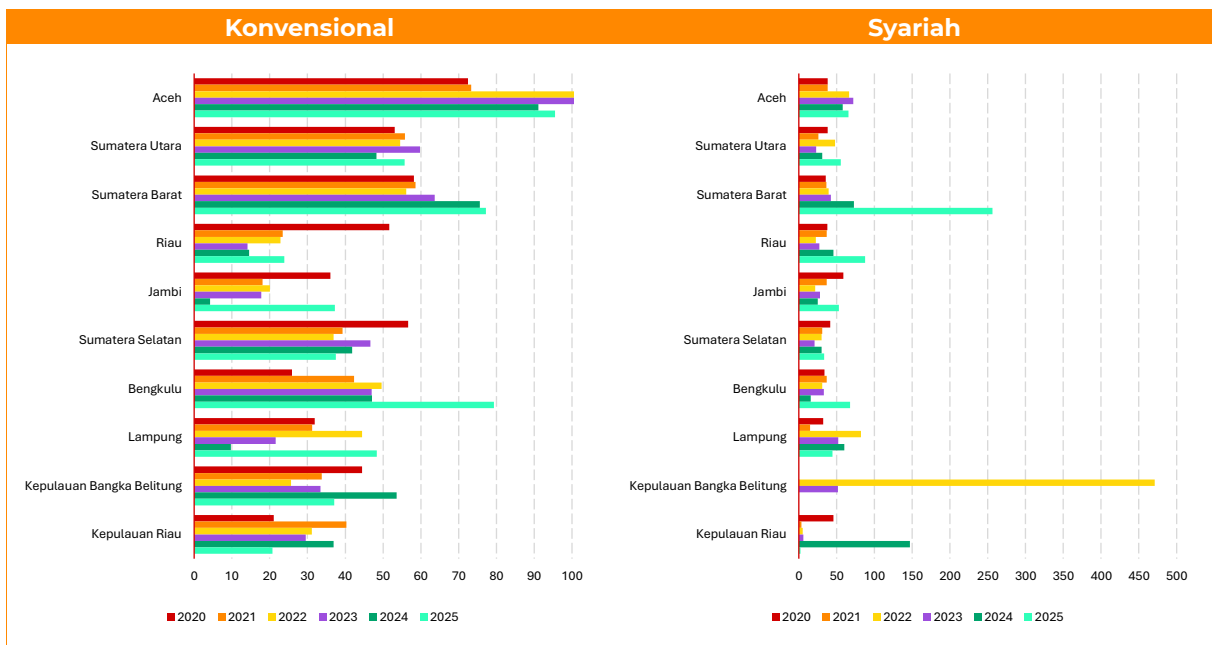
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Realisasi klaim asuransi jiwa konvensional di Pulau Sumatera menunjukkan konsentrasi beban risiko yang sangat tinggi di Sumatera Utara, di mana nilainya secara konsisten berada di atas Rp 7.000 miliar dan melonjak tajam hingga menembus Rp 10.000 miliar pada tahun 2024. Skala klaim yang sangat besar di wilayah ini mengonfirmasi bahwa Sumatera Utara merupakan pasar asuransi jiwa paling matang dengan jumlah pemegang polis aktif terbesar. Sementara itu, provinsi lain, seperti Riau, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau menunjukkan stabilitas pembayaran manfaat klaim yang terjaga di kisaran Rp 1.000 hingga Rp 1.800 miliar mencerminkan fungsi proteksi finansial yang berjalan stabil bagi masyarakat di wilayah-wilayah penyangga ekonomi utama tersebut.

Pada asuransi jiwa syariah, distribusi klaim memiliki skala nominal yang jauh lebih kecil (di bawah Rp 2.400 miliar), namun menunjukkan dinamika pertumbuhan yang sangat fluktuatif dan menarik. Sumatera Utara tetap mendominasi pasar syariah dengan puncak pembayaran klaim mencapai lebih dari Rp 2.200 miliar pada tahun 2021 sebelum mengalami normalisasi di tahun-tahun berikutnya. Fenomena signifikan juga terlihat di Aceh dan Riau, di mana terdapat lonjakan klaim syariah yang cukup tajam pada tahun 2023 yang mengindikasikan adanya penyelesaian kewajiban manfaat polis secara kolektif pada periode tersebut. Meskipun skalanya tidak sebesar konvensional, pertumbuhan klaim syariah yang tersebar di hampir seluruh provinsi menunjukkan bahwa model asuransi berbasis prinsip tolong-menolong ini telah diterima secara luas sebagai jaring pengaman ekonomi yang kredibel di Sumatera.

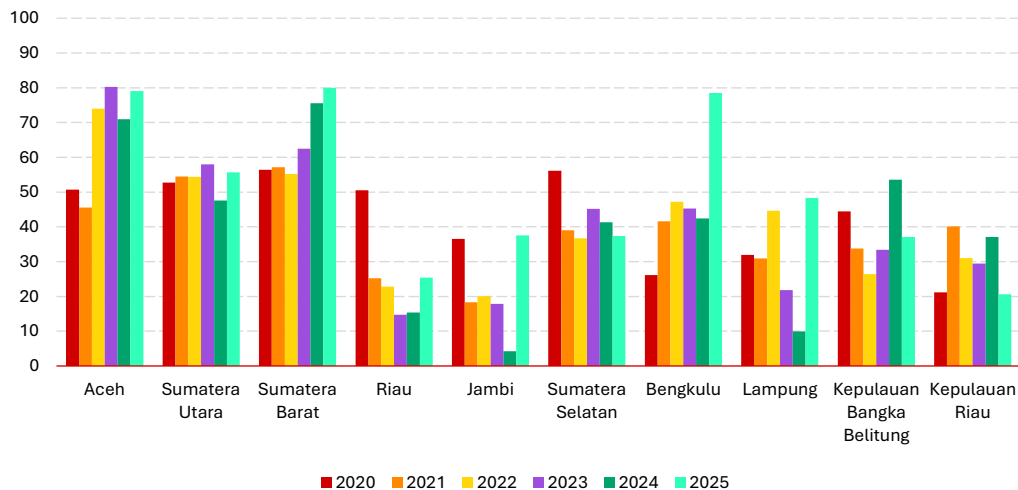
Rasio Klaim

Rasio klaim merupakan perbandingan antara jumlah klaim yang dibayarkan dengan premi yang diterima. Rasio ini menjadi indikator kesehatan bagi keberlanjutan industri asuransi. Analisis rasio klaim per wilayah di Sumatera dilakukan untuk mengidentifikasi provinsi dengan tingkat risiko (*loss ratio*) yang tinggi yang selanjutnya dapat menjadi dasar bagi evaluasi tarif premi berbasis risiko serta penguatan mitigasi risiko pada sektor-sektor yang paling rentan. Rasio yang stabil menunjukkan bahwa industri mampu memenuhi kewajibannya kepada peserta tanpa mengancam keberlanjutan finansial perusahaan. Di Pulau Sumatera, pemetaan rasio klaim per provinsi merupakan hal penting bagi otoritas dan pelaku pasar untuk mengetahui wilayah dengan tingkat eksposur risiko tinggi, serta menyesuaikan strategi penetapan tarif premi agar tetap kompetitif, namun tetap aman secara solvabilitas.



Gambar 15 Perkembangan Rasio Klaim Asuransi Umum di Pulau Sumatera (%)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

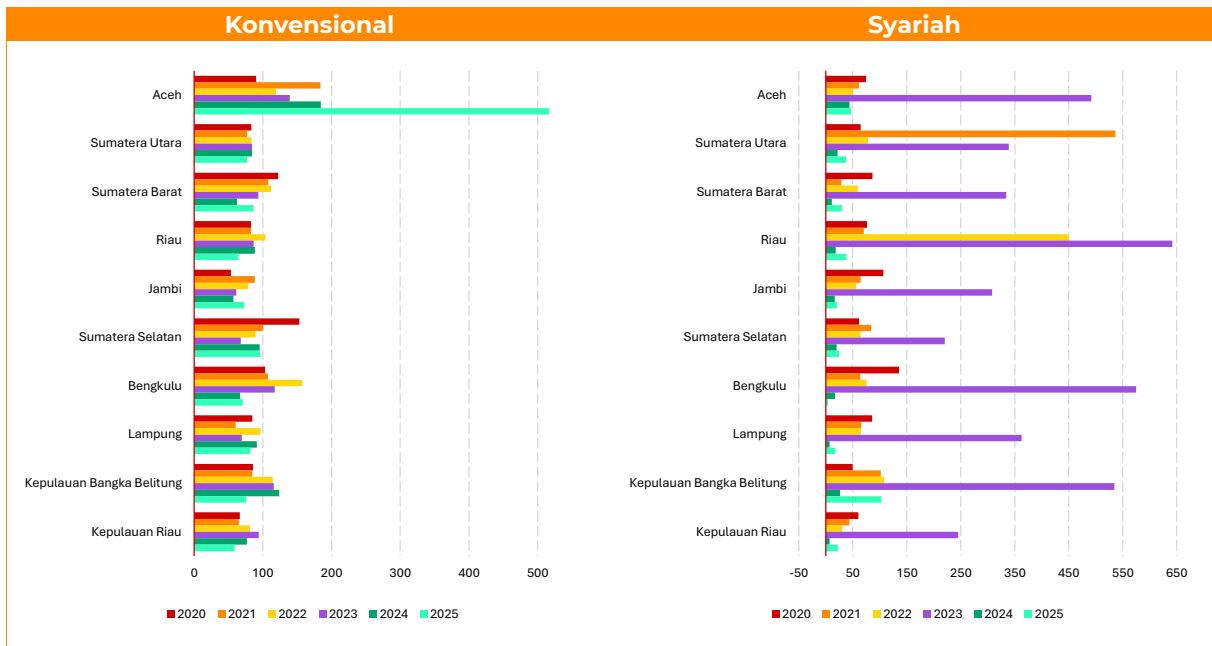


Gambar 16 Perkembangan Klaim Asuransi Umum di Pulau Sumatera (Rp Miliar)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

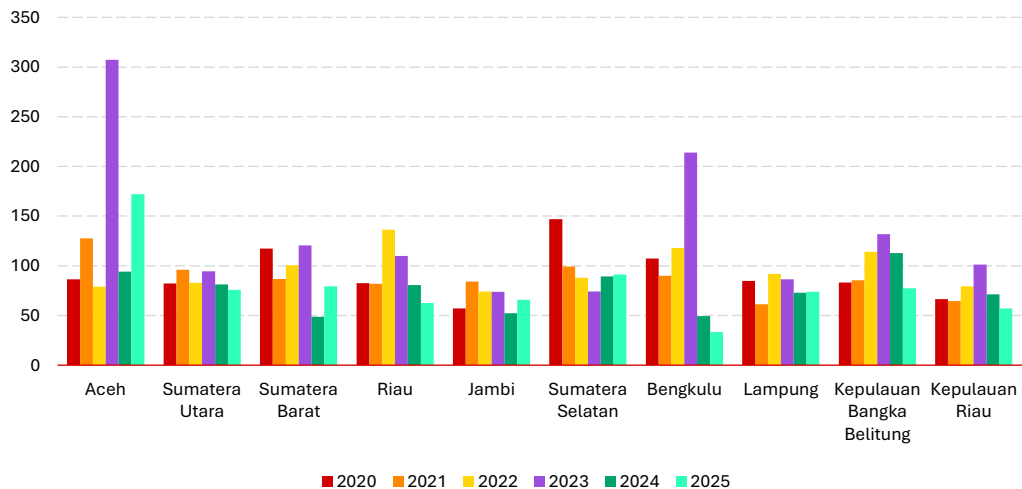
Berdasarkan gambar tersebut, sektor konvensional menunjukkan tingkat rasio klaim yang relatif terkendali, namun dengan anomali tinggi di wilayah utara. Aceh mencatatkan rasio klaim konvensional tertinggi yang konsisten berada di kisaran 80% hingga 100% mengindikasikan margin yang sangat tipis antara pendapatan premi dan beban risiko di provinsi tersebut. Sementara itu, wilayah industri seperti Sumatera Utara dan Riau memiliki rasio yang jauh lebih sehat di bawah 60% yang menunjukkan efisiensi underwriting yang baik meskipun volume premi yang dikelola sangat besar. Di sisi lain, Bengkulu menunjukkan tren lonjakan rasio klaim yang sangat drastis pada tahun 2025 yang memberikan indikasi perlunya kewaspadaan terhadap potensi peningkatan klaim di masa mendatang.

Pada asuransi umum syariah, peta risiko menunjukkan pola yang sangat kontras dengan lonjakan ekstrem di beberapa wilayah kepulauan. Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan anomali rasio klaim syariah yang melampaui 400% pada tahun 2022, sebuah kondisi yang menandakan terjadinya pembayaran klaim besar (*catastrophic claim*) yang jauh melampaui basis premi syariah yang masih kecil di wilayah tersebut. Fenomena serupa terlihat pada Sumatera Barat yang mengalami lonjakan rasio klaim syariah di atas 250% pada tahun 2025. Pergerakan angka yang sangat volatil pada model syariah ini menegaskan bahwa sektor tersebut masih berada pada tahap pengembangan pasar, di mana fluktuasi satu atau dua klaim besar dapat secara instan mengubah profil risiko wilayah karena basis dana tabarru'.



Gambar 17 Perkembangan Rasio Klaim Asuransi Jiwa di Pulau Sumatera (%)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan



Gambar 18 Perkembangan Klaim Asuransi Jiwa di Pulau Sumatera (Rp Miliar)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

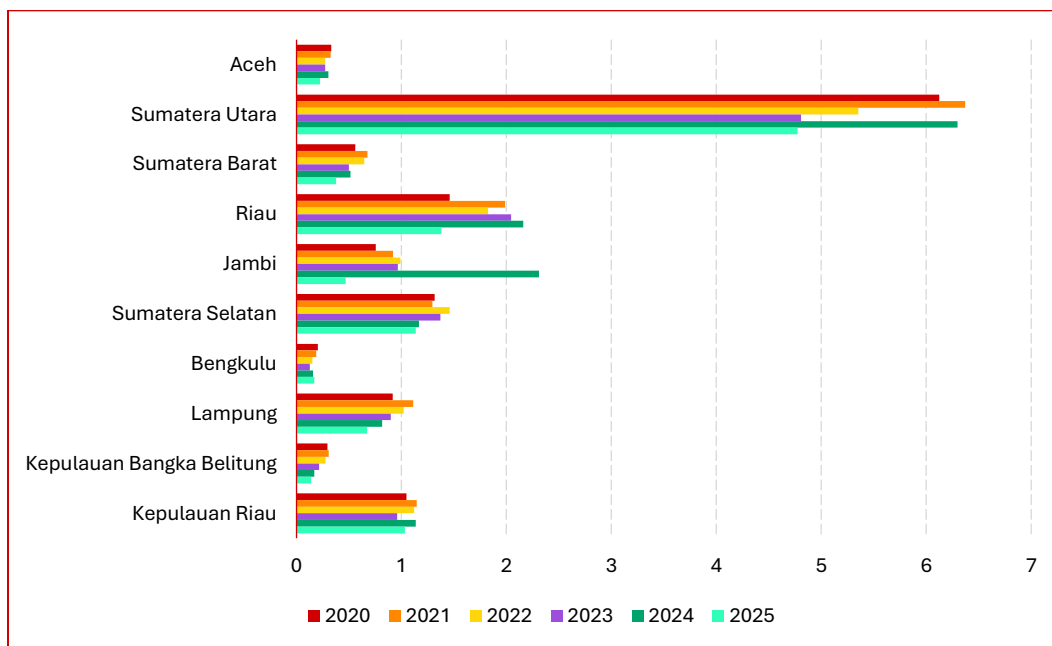
Rasio klaim pada asuransi jiwa konvensional menunjukkan tingkat stabilitas yang sangat baik dan konsisten di sebagian besar wilayah dengan mayoritas provinsi berada pada kisaran 60% hingga 100%. Aceh mencatatkan tren yang unik dengan lonjakan rasio klaim yang sangat tajam pada tahun 2025 menembus angka 500%. Lonjakan ekstrem ini mengindikasikan adanya pembayaran manfaat polis dalam jumlah besar secara serentak atau jatuh tempo polis massal di wilayah tersebut pada periode tersebut. Sementara itu, Provinsi

Sumatera Utara dan Riau menunjukkan rasio yang sangat sehat dan stabil di bawah 100% mencerminkan pengelolaan dana premi yang kuat dan underwriting yang akurat.

Di sisi lain, asuransi jiwa syariah menunjukkan volatilitas yang jauh lebih tinggi dengan angka rasio yang melonjak drastis pada tahun 2023 di hampir seluruh provinsi. Di Riau, rasio klaim syariah menembus angka di atas 600%, disusul oleh Bengkulu yang berada di kisaran 575% dan Kepulauan Bangka Belitung yang berada di kisaran 530%. Fenomena lonjakan serentak di tahun 2023 ini menunjukkan terjadinya siklus klaim atau penebusan manfaat yang masif pada produk-produk syariah di tahun tersebut. Namun, tahun 2024 dan 2025 rasio klaim kembali ke level di bawah 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun industri asuransi jiwa syariah di Sumatera sempat menghadapi tekanan likuiditas beban klaim yang tinggi, ekosistem syariah tetap memiliki resiliensi untuk kembali ke titik keseimbangan.

Penetrasi Asuransi terhadap PDRB

Penetrasi asuransi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makroekonomi yang menggambarkan tingkat integrasi industri asuransi ke dalam aktivitas ekonomi riil di suatu wilayah. Rasio ini tidak hanya mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap instrumen proteksi, tetapi juga menunjukkan kematangan sektor finansial dalam mendukung resiliensi ekonomi daerah. Tingginya angka penetrasi di suatu provinsi mengindikasikan bahwa setiap satuan nilai ekonomi yang dihasilkan telah diimbangi dengan upaya mitigasi risiko yang memadai sehingga menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkelanjutan terhadap potensi guncangan di masa depan.



Gambar 19 Penetrasi Asuransi Terhadap PDRB di Pulau Sumatera (%)

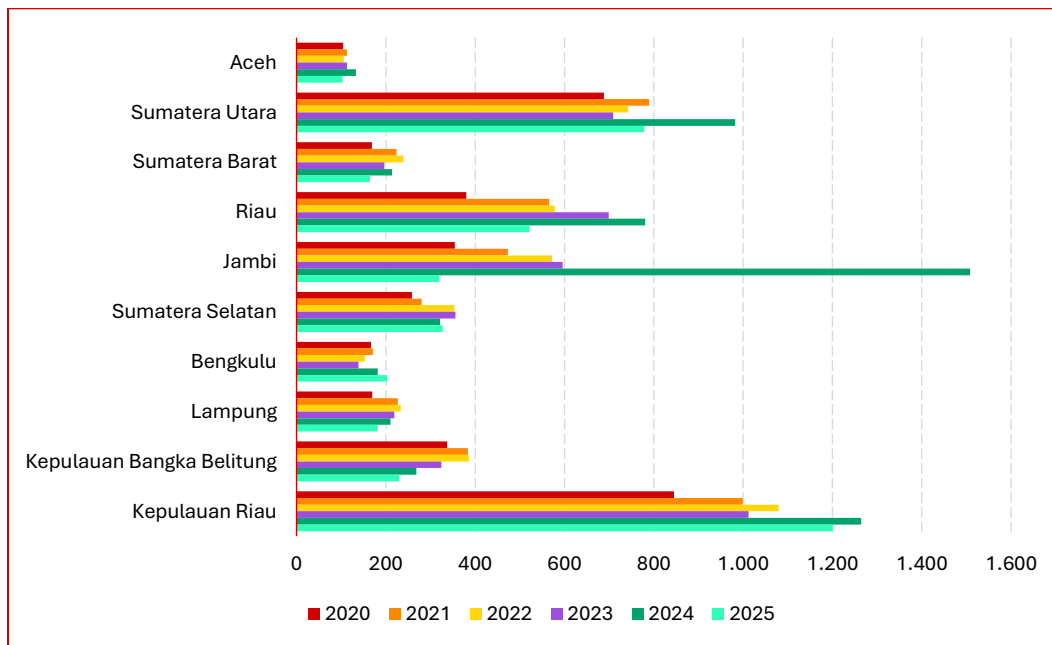
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data pada gambar tersebut, Sumatera Utara mendominasi secara absolut dengan tingkat penetrasi yang jauh melampaui provinsi lainnya, yakni berada di kisaran 4,8% hingga 6,3%. Angka ini menunjukkan bahwa integrasi asuransi dalam struktur ekonomi Sumatera Utara sudah sangat matang, bahkan melampaui rata-rata penetrasi di Pulau Sumatera. Dominasi ini didorong oleh konsentrasi sektor industri, jasa, dan perdagangan di wilayah tersebut yang memiliki kesadaran tinggi terhadap perlindungan aset, serta asuransi jiwa bagi tenaga kerja.

Provinsi lain, seperti Riau dan Jambi menunjukkan dinamika penetrasi yang stabil, namun menurun signifikan pada tahun 2025. Jambi mencatatkan lonjakan penetrasi yang signifikan pada tahun 2024 selaras dengan pertumbuhan premi yang di tahun yang sama. Sementara itu, Provinsi Aceh, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi tantangan penetrasi yang cukup besar dengan angka di bawah 1%. Rendahnya rasio penetrasi di wilayah-wilayah tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDRB belum sepenuhnya diikuti oleh pertumbuhan konsumsi produk asuransi sehingga terdapat potensi pasar yang sangat luas untuk digarap melalui peningkatan literasi keuangan dan penyediaan produk asuransi yang lebih inklusif.

Premi per Kapita

Premi per kapita atau kepadatan asuransi (*insurance density*), menggambarkan rata-rata kontribusi finansial yang dikeluarkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah untuk layanan asuransi dalam periode satu tahun. Indikator ini digunakan menilai tingkat inklusi keuangan, daya beli masyarakat, serta efektivitas edukasi mengenai pentingnya manajemen risiko di tingkat individu. Tingginya angka premi per kapita di suatu provinsi mencerminkan kesadaran ekonomi masyarakat yang lebih maju, di mana asuransi telah dipandang sebagai kebutuhan dalam perencanaan keuangan keluarga dan perlindungan aset pribadi.



Gambar 20 Premi per Kapita di Pulau Sumatera (Rp Ribu)

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data kepadatan asuransi periode 2020–2025, Jambi mencatatkan anomali pertumbuhan yang sangat masif pada tahun 2024, di mana premi per kapita melonjak hingga melampaui angka Rp 1,5 juta. Lonjakan ini mengindikasikan adanya ekspansi pasar atau pergeseran perilaku konsumsi jasa keuangan di wilayah tersebut. Sementara itu, Kepulauan Riau menunjukkan stabilitas kepadatan asuransi yang sangat tinggi dan konsisten dengan nilai yang terus merangkak naik hingga melampaui Rp 1,2 juta yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan literasi keuangan yang mapan di wilayah pusat perdagangan tersebut.

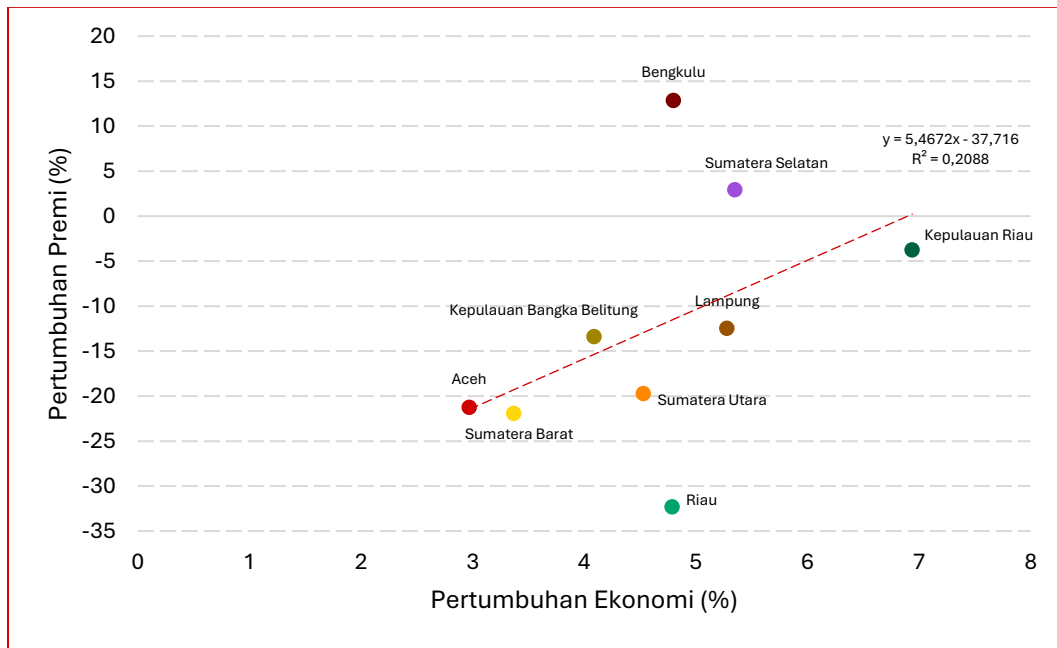
Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan angka premi per kapita yang stabil di kisaran Rp 700 Ribu hingga Rp 1 juta. Provinsi Aceh dan Bengkulu masih mencatatkan angka premi per kapita terendah (berada di bawah Rp 200 Ribu) yang menunjukkan bahwa penetrasi asuransi di tingkat individu masih menghadapi tantangan besar. Rendahnya angka ini memberikan informasi bagi para pelaku industri untuk melakukan diversifikasi produk yang lebih terjangkau (asuransi mikro) guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, tren premi per kapita di Sumatera menunjukkan arah yang positif yang mengindikasikan bahwa masyarakat perlahan mulai mengintegrasikan proteksi asuransi ke dalam pola pengeluaran rutin mereka.

Analisis *Linkage* antara Kinerja Makroekonomi Regional dengan Kinerja Industri Asuransi

Hubungan antara kinerja makroekonomi dan industri asuransi bersifat simbiotik dan multidimensional. Pertumbuhan ekonomi regional yang kuat tecermin dalam peningkatan PDRB dan pendapatan per kapita akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk proteksi finansial. Sebaliknya, industri asuransi berperan sebagai penyangga stabilitas ekonomi melalui mekanisme pengalihan risiko dan akumulasi dana jangka panjang yang dapat direinvestasikan ke dalam pembangunan daerah. Analisis *linkage* ini bertujuan untuk membedah sejauh mana variabel makroekonomi di Pulau Sumatera memengaruhi dinamika penetrasi dan densitas asuransi, serta bagaimana sektor asuransi merespons fluktuasi siklus ekonomi di masing-masing provinsi.

Analisis Korelasi PDRB terhadap Premi

Secara empiris, permintaan asuransi di Sumatera cenderung bersifat elastis terhadap pertumbuhan PDRB. Provinsi dengan skala ekonomi besar, seperti Sumatera Utara dan Riau menunjukkan bahwa setiap kenaikan unit ekonomi diikuti oleh pertumbuhan volume premi yang lebih tinggi secara proporsional. Asuransi mulai dipandang sebagai kebutuhan pokok seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat variasi pada wilayah dengan basis ekonomi komoditas, di mana fluktuasi harga global pada sektor unggulan daerah secara tidak langsung memengaruhi likuiditas masyarakat dalam membayar premi berkelanjutan.

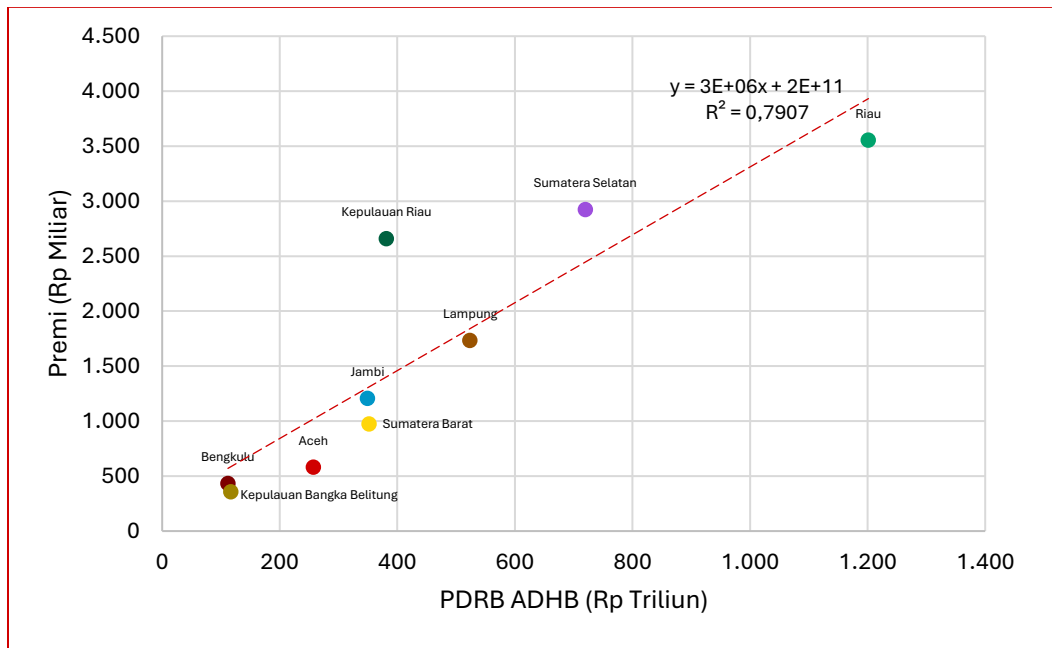


Gambar 21 Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Premi, 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan (Diolah, 2026)

Secara umum, terdapat anomali atau korelasi negatif yang cukup tajam antara laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan premi di sebagian besar provinsi Sumatera. Meskipun seluruh provinsi mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di kisaran 3% hingga 7%. Fenomena paling ekstrem terlihat di Jambi, di mana pertumbuhan ekonomi yang stabil justru beriringan dengan penurunan pertumbuhan premi yang sangat dalam (mencapai hampir -80%). Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi makro di wilayah tersebut pada tahun 2025 tidak secara otomatis terkonversi menjadi peningkatan belanja proteksi asuransi.

Di sisi lain, hanya Bengkulu dan Sumatera Selatan yang menunjukkan tren positif, di mana pertumbuhan premi mampu bergerak ke arah zona pertumbuhan positif di tengah laju ekonomi yang moderat. Sebaliknya, wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi seperti Kepulauan Bangka Belitung dan Aceh tetap mencatatkan pertumbuhan premi di zona negatif. Perbedaan kontras ini menunjukkan bahwa dinamika industri asuransi di Sumatera saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sektoral atau siklus bisnis spesifik dibandingkan dengan pergerakan PDRB secara agregat.



Gambar 22 Korelasi PDRB ADHB dan Premi Asuransi, 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan (Diolah, 2026)

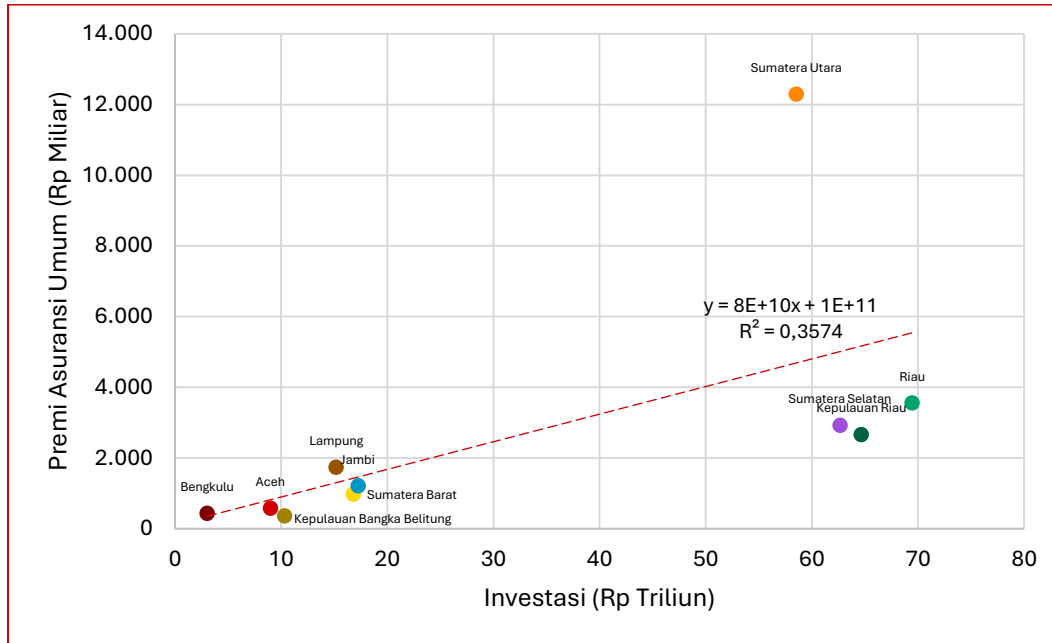
Gambar di atas menunjukkan pemusatan aktivitas asuransi yang linear di sebagian besar wilayah. Sumatera Utara menguasai pangsa pasar premi terbesar di pulau ini dengan nilai premi yang mencapai lebih dari Rp12.000 miliar didukung oleh PDRB total tertinggi. Dominasi ini tidak hanya mencerminkan skala pasar (market size) yang besar, tetapi juga tingkat kematangan industri keuangan serta densitas penduduk yang tinggi di wilayah pusat pertumbuhan tersebut. Sementara itu, Riau menunjukkan posisi korelasi yang sehat di kisaran Rp 3.000 hingga Rp 4.000 miliar, didukung oleh PDRB besar dari sektor komoditas dan industri pengolahan yang memiliki eksposur risiko tinggi.

Sebaliknya, Kepulauan Riau menunjukkan posisi yang sangat menarik karena meskipun skala PDRB ADHB regionalnya berada di bawah Rp 400 Triliun, perolehan premi totalnya justru lebih tinggi berada di atas Rp 2.000 miliar. Hal ini mengonfirmasi bahwa provinsi dengan PDRB tinggi, seperti Kepulauan Riau cenderung memiliki literasi keuangan yang lebih matang sehingga asuransi mulai dipandang sebagai kebutuhan dalam perencanaan keuangan masyarakatnya. Sebaliknya, wilayah yang berada di kisaran PDRB di bawah Rp 200 Triliun, seperti Bengkulu dan Aceh menunjukkan tingkat penetrasi asuransi yang relatif linear namun dengan volume premi yang masih terbatas, menandakan masih adanya insurance gap atau kesenjangan proteksi yang menjadi peluang bagi para pelaku industri untuk melakukan penetrasi pasar yang lebih agresif.

Analisis Korelasi Investasi terhadap Asuransi Umum

Investasi merupakan variabel makroekonomi yang memiliki hubungan kausalitas paling kuat terhadap performa asuransi umum. Permintaan terhadap produk asuransi umum (non-jiwa) di Pulau Sumatera bersifat derived demand, di mana kebutuhan proteksinya muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya aktivitas investasi fisik, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing

(PMA). Setiap peningkatan realisasi investasi untuk pembangunan infrastruktur, pabrik, pengadaan mesin, hingga ekspansi armada transportasi secara otomatis memperluas basis objek pertanggungan (*insurable interest*) di suatu wilayah.



Gambar 23 Korelasi Investasi dan Premi Asuransi Umum, 2025

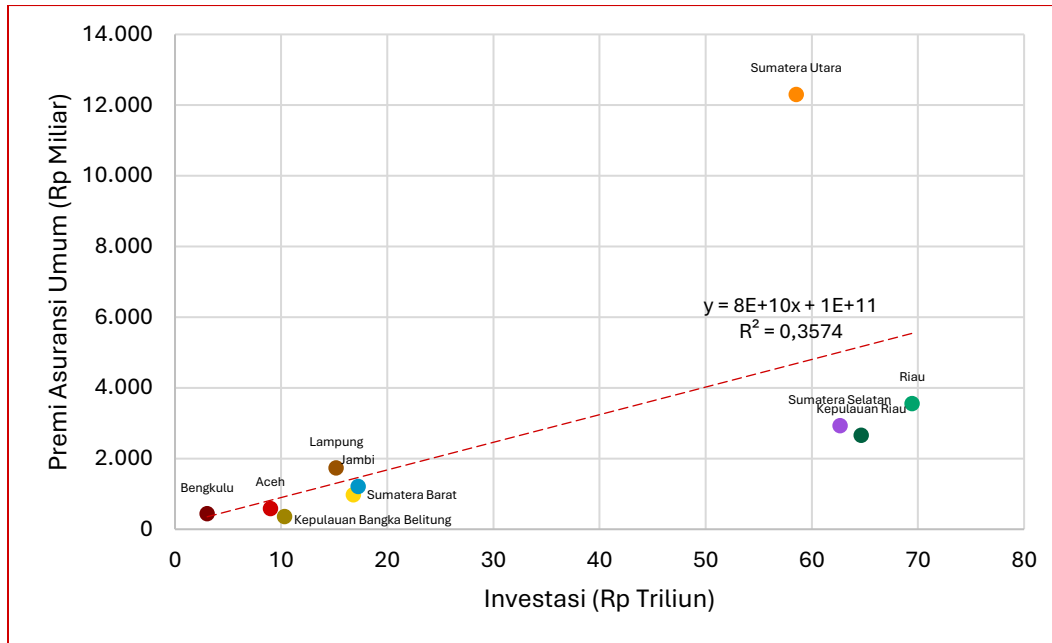
Sumber : Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan (Diolah, 2026)

Gambar tersebut menunjukkan pemusatan aktivitas asuransi umum yang linear di sebagian besar wilayah. Sumatera Utara menguasai pangsa pasar premi asuransi umum terbesar di pulau ini, di mana nilai premi mencapai lebih dari Rp 12.000 miliar yang didukung oleh realisasi investasi regional yang sangat tinggi di kisaran Rp 60 Triliun. Dominasi ini tidak hanya mencerminkan skala pasar (*market size*) yang besar, tetapi juga tingkat kematangan industri keuangan serta densitas objek asuransi yang sangat tinggi di wilayah pusat pertumbuhan tersebut. Sementara itu, Riau menunjukkan posisi korelasi yang sehat di kisaran Rp 3.000 hingga Rp 4.000 miliar, didukung oleh investasi besar dari sektor komoditas dan industri pengolahan yang memiliki eksposur risiko tinggi.

Sebaliknya, Provinsi Bengkulu dan Aceh menunjukkan tingkat penetrasi asuransi umum yang relatif linear namun dengan volume premi yang masih terbatas yang berada di kisaran di bawah Rp 1.000 miliar. Skala investasi yang masih kecil di bawah Rp 10 Triliun di wilayah tersebut membatasi pertumbuhan basis objek asuransi fisik. Kondisi ini memberikan sinyal bagi para pelaku industri untuk melakukan diversifikasi produk yang lebih inklusif serta memperkuat edukasi mengenai pentingnya asuransi bagi keberlangsungan sektor usaha kecil guna meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah-wilayah penyangga ekonomi Sumatera di masa depan.

Analisis Korelasi Tingkat Pengangguran terhadap Asuransi Jiwa

Kinerja asuransi jiwa memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas pasar tenaga kerja, mengingat pembayaran premi bersifat jangka panjang dan sangat bergantung pada kepastian pendapatan individu. Secara teoretis, tingkat pengangguran yang rendah berkorelasi dengan peningkatan *disposable income* yang akan mendorong permintaan akan produk proteksi jiwa dan investasi berbasis asuransi. Namun, dinamika di Pulau Sumatera memperlihatkan variasi spasial yang menarik, di mana beberapa wilayah tetap mampu mencatatkan pertumbuhan premi yang signifikan meskipun menghadapi tantangan struktur ketenagakerjaan tertentu.



Gambar 24 Korelasi Tingkat Pengangguran Terbuka dan Premi Asuransi Jiwa, 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan (Diolah, 2026)

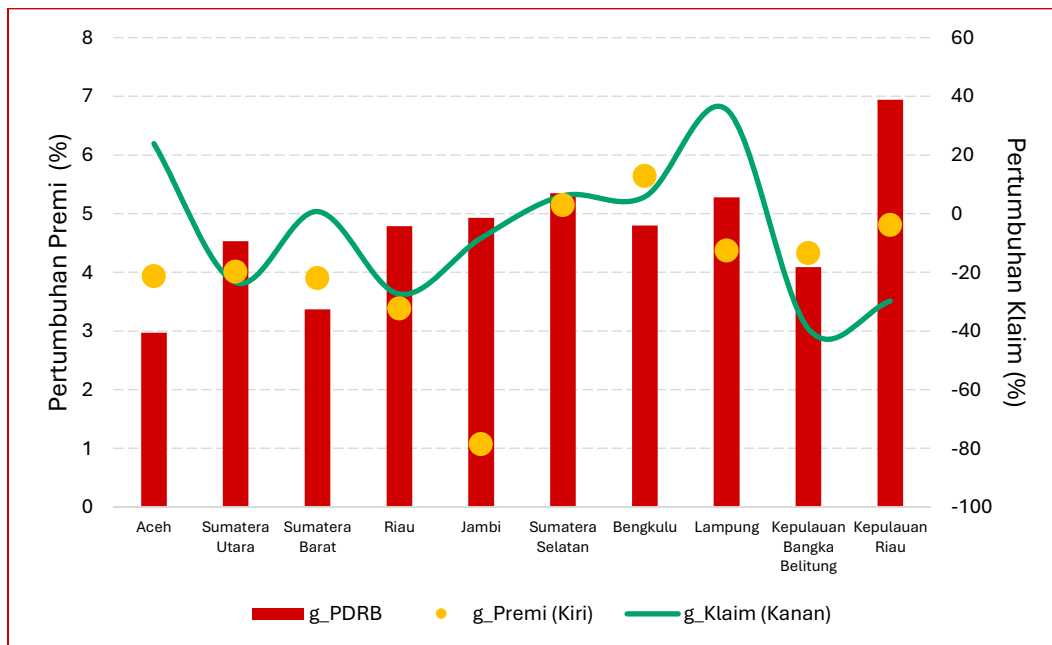
Berdasarkan grafik sebaran TPT terhadap premi asuransi jiwa, Sumatera Utara sebagai wilayah dengan volume premi tertinggi (mendekati Rp 10.000 Miliar) pada tingkat pengangguran di 5,32%. Hal ini mengindikasikan bahwa di pusat ekonomi utama, faktor skala populasi dan literasi keuangan yang tinggi mampu memitigasi dampak pengangguran terhadap total perolehan premi. Sebaliknya, pada Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan TPT tertinggi di pulau Sumatera (melampaui 6%), namun tetap menjaga volume premi asuransi jiwa yang lebih baik dibandingkan provinsi dengan pengangguran lebih rendah seperti Bengkulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas lapangan kerja di sektor formal dan jasa di Kepulauan Riau memberikan daya beli yang lebih resilien bagi masyarakatnya untuk tetap berasuransi.

Provinsi Riau, Lampung, dan Sumatera Selatan termasuk dalam klaster dengan tingkat pengangguran menengah antara 3,50% hingga 4,50% dengan volume premi jiwa di bawah Rp 2.000 Miliar. Klaster ini mencerminkan ketergantungan yang moderat antara ketersediaan lapangan kerja dengan pertumbuhan industri asuransi jiwa. Sementara itu, wilayah dengan pengangguran terendah seperti Bengkulu (di bawah 3,50%) justru memiliki perolehan premi terendah yang mengonfirmasi bahwa rendahnya tingkat pengangguran saja tidak cukup untuk mendorong industri asuransi jiwa tanpa didukung oleh tingkat upah yang memadai dan

kedalaman sektor keuangan formal. Secara keseluruhan, peningkatan partisipasi tenaga kerja di sektor bernilai tambah tinggi menjadi kunci utama untuk mengakselerasi pertumbuhan asuransi jiwa di seluruh provinsi Sumatera.

Pertumbuhan PDRB, Premi, dan Klaim

Analisis terhadap hubungan antara pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan industri asuransi (premi dan klaim) merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana kesejahteraan ekonomi berdampak pada kesadaran mitigasi risiko masyarakat. Secara teoretis, peningkatan PDRB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya diikuti oleh penguatan kapasitas finansial masyarakat untuk mengakses layanan asuransi yang tecermin dalam pertumbuhan nilai premi. Di sisi lain, fluktuasi klaim menjadi indikator kualitas manajemen risiko dan stabilitas operasional industri asuransi di tengah dinamika ekonomi yang terjadi di tiap provinsi. Melalui perbandingan ketiga variabel ini, dapat diidentifikasi pola efisiensi ekonomi dan penetrasi pasar asuransi di wilayah Sumatera.



Gambar 25 Pertumbuhan PDRB, Premi, dan Klaim, 2025

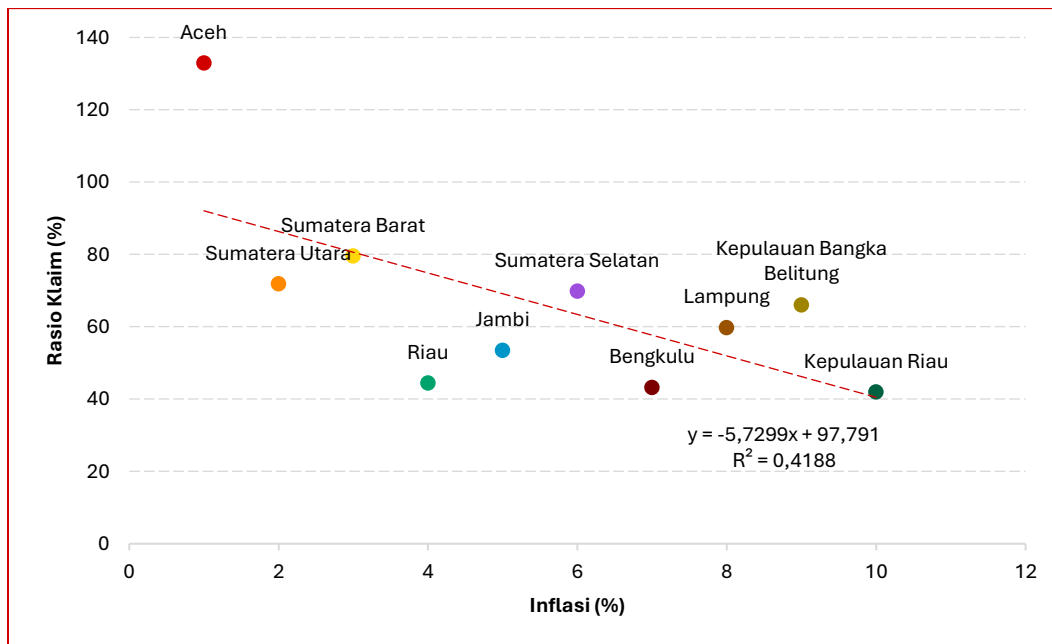
Sumber : Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan (Diolah, 2026)

Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan aktivitas asuransi. Provinsi Kepulauan Riau mencatatkan pertumbuhan PDRB tertinggi yang mendekati angka 7,00%, namun hal ini tidak serta-merta diikuti oleh lonjakan klaim yang ekstrem, di manah al ini menunjukkan stabilitas risiko yang cukup baik di wilayah tersebut. Sebaliknya, Provinsi Lampung menunjukkan anomali yang menarik di mana pertumbuhan klaim melonjak tajam hingga mendekati angka 40,00% di skala kanan yang melampaui pertumbuhan premi dan PDRB-nya. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan beban pembayaran manfaat asuransi yang signifikan di wilayah Lampung pada periode tersebut.

Di sisi lain, sektor asuransi di Provinsi Jambi menghadapi tantangan yang berbeda, ditandai dengan penurunan tajam pada pertumbuhan premi yang merosot hingga titik terendah di bawah -70,00%. Penurunan drastis ini kontras dengan pertumbuhan PDRB-nya yang tetap stabil di kisaran 5,00%, menunjukkan bahwa ekspansi ekonomi di Jambi tidak terkonversi menjadi pertumbuhan penetrasi asuransi baru. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa meski pertumbuhan ekonomi di Sumatera relatif stabil di angka 3,00% hingga 7,00%, volatilitas pada sektor asuransi (khususnya klaim dan premi) jauh lebih tinggi dan tidak selalu bergerak searah dengan tren pertumbuhan ekonomi wilayahnya.

Inflasi dan Rasio Klaim

Hubungan antara inflasi dan rasio klaim merupakan indikator efisiensi industri asuransi dalam menghadapi fluktuasi harga. Inflasi yang tinggi di suatu provinsi cenderung memberikan tekanan pada margin profitabilitas perusahaan asuransi melalui jalur *cost-push claim*. Ketika harga-harga barang dan jasa di daerah meningkat, biaya pemulihan aset, seperti biaya perbaikan kendaraan, material bangunan, atau biaya layanan kesehatan juga ikut naik sehingga nilai klaim yang harus dibayarkan perusahaan asuransi menjadi lebih besar secara nominal.



Gambar 26 Inflasi dan Rasio Klaim Asuransi, 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan (Diolah, 2026)

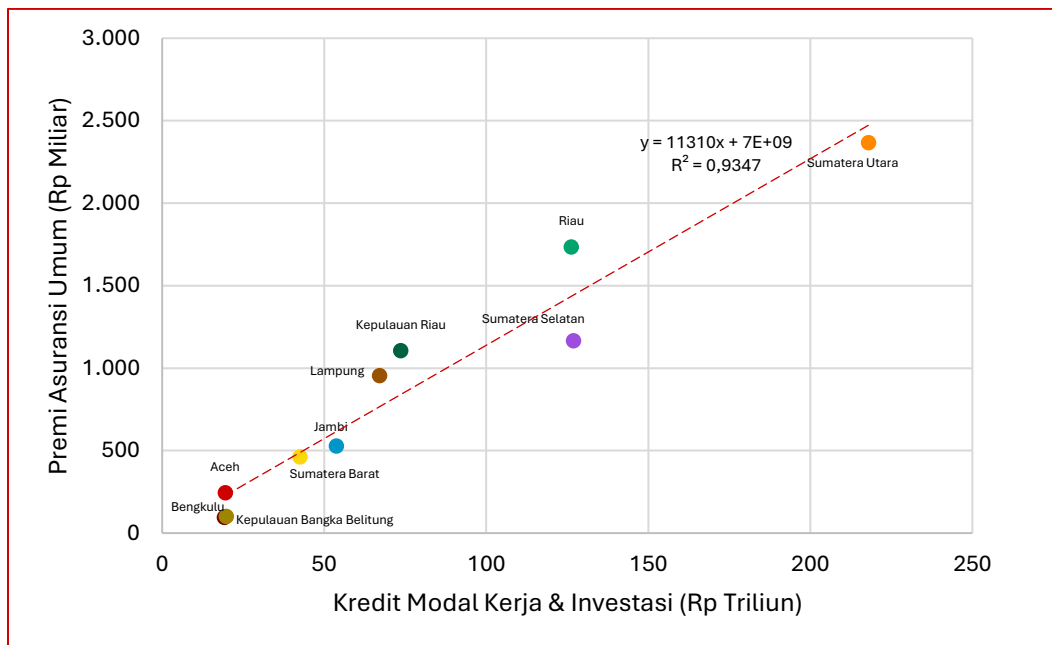
Berdasarkan gambar tersebut, Provinsi Aceh mengalami lonjakan inflasi yang mendekati 7% berkorelasi linier dengan rasio klaim yang melampaui 130%. Kondisi ini menunjukkan bahwa volatilitas harga di daerah dapat menyebabkan tekanan teknis yang berat bagi profitabilitas industri, terutama jika penetapan tarif premi belum sepenuhnya mengantisipasi laju inflasi lokal yang ekstrem.

Sebaliknya, stabilitas makroekonomi di provinsi lain, seperti Lampung memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional industri asuransi, di mana tingkat inflasi yang rendah (di bawah 2%) dengan rasio

klaim yang terjaga di level moderat (sekitar 60%). Perbedaan kontras antara Aceh dan Lampung ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi daerah oleh pemerintah provinsi memiliki *spillover effect* terhadap kesehatan sektor jasa keuangan. Hal ini memberikan sinyal penting mengenai perlunya strategi mitigasi risiko berbasis kewilayahan, seperti penyesuaian skema pertanggungan atau diversifikasi aset guna menghindari risiko *underinsurance* dan pembengkakan klaim akibat fluktuasi indeks harga konsumen di berbagai wilayah penyangga ekonomi Sumatera.

Kredit Perbankan vs Asuransi

Penyaluran kredit perbankan, khususnya pada segmen produktif, memiliki korelasi linear yang kuat terhadap pertumbuhan premi asuransi umum di Pulau Sumatera. Hubungan ini bersifat fungsional, di mana setiap fasilitas kredit modal kerja, maupun investasi yang dikucurkan untuk pembangunan pabrik, pengadaan mesin, maupun modal operasional usaha biasanya mewajibkan adanya proteksi asuransi atas aset yang menjadi agunan. Hal ini menempatkan industri asuransi sebagai mitra strategis perbankan dalam memitigasi risiko kegagalan bisnis akibat kerusakan fisik aset, sekaligus menjadikan asuransi umum sebagai komponen biaya investasi yang melekat pada aktivitas ekonomi riil di daerah.



Gambar 27 Kredit Modal Kerja dan Investasi terhadap Premi Asuransi Umum, 2025

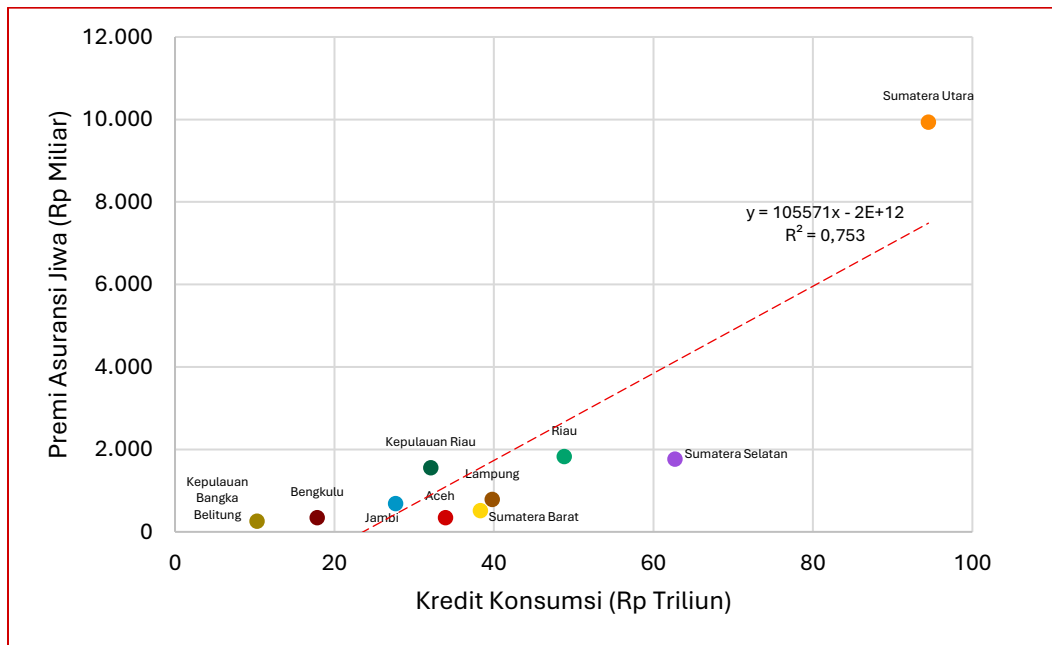
Sumber : Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan (Diolah, 2026)

Gambar tersebut memperlihatkan bahwa Sumatera Utara menempati posisi puncak sebagai wilayah dengan aktivitas *linkage* perbankan-asuransi paling tinggi dengan penyaluran kredit modal kerja dan investasi yang melampaui Rp 200 Triliun, perolehan premi asuransi umum di Provinsi Sumatera Utara berada di atas Rp 2.000 miliar. Fenomena serupa terlihat di Riau yang meskipun memiliki volume kredit di kisaran Rp 125 Triliun,

tetap mampu menghasilkan premi asuransi umum yang signifikan mendekati Rp 1.750 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah dengan basis industri dan pertanian, setiap rupiah kredit yang disalurkan memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap industri asuransi umum.

Sebaliknya, wilayah dengan penyaluran kredit produktif di bawah Rp 50 Triliun seperti Aceh, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan volume premi asuransi umum terendah, berada di bawah Rp500 Miliar. Rendahnya angka ini memberikan indikasi adanya *insurance gap* pada sektor usaha mikro dan kecil di wilayah-wilayah penyangga tersebut. Strategi akselerasi kredit produktif di wilayah ini perlu diimbangi dengan penguatan edukasi proteksi aset agar pertumbuhan ekonomi daerah didukung oleh ekosistem keuangan yang resilien. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa keberlanjutan industri asuransi umum di Sumatera sangat bergantung pada *appetite* perbankan dalam mendukung ekspansi sektor usaha di masing-masing provinsi.

Penyaluran kredit konsumsi memiliki keterkaitan yang kuat dengan pertumbuhan premi asuransi jiwa di Pulau Sumatera. Kredit konsumsi yang didominasi oleh fasilitas KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dan KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) merupakan pendorong utama bagi volume premi asuransi jiwa melalui produk Asuransi Jiwa Kredit (AJK). Setiap fasilitas kredit konsumsi yang dikucurkan biasanya mewajibkan proteksi asuransi jiwa guna melindungi bank dari risiko gagal bayar jika terjadi risiko kematian pada debitur. Hal ini menempatkan industri asuransi jiwa sebagai mitra strategis perbankan dalam memitigasi risiko kegagalan kredit konsumsi sekaligus menjadikan asuransi jiwa sebagai komponen biaya proteksi yang melekat pada aktivitas ekonomi riil di daerah.



Gambar 28 Kredit Konsumsi terhadap Premi Asuransi Jiwa, 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan (Diolah, 2026)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Utara menempati posisi puncak sebagai wilayah dengan aktivitas *linkage* perbankan-asuransi jiwa paling besar. Dengan penyaluran kredit konsumsi yang

hampir Rp 100 Triliun, perolehan premi asuransi jiwa di Provinsi Sumatera Utara sangat tinggi di kisaran Rp 10.000 Miliar. Posisi dominan ini tidak hanya mencerminkan skala pasar (*market size*) yang besar, tetapi juga tingkat kematangan industri keuangan, serta densitas objek asuransi yang sangat tinggi di wilayah pusat pertumbuhan tersebut. Sementara itu, Riau, Lampung, dan Sumatera Selatan berada pada kisaran Rp 2.000 Miliar yang didukung oleh tingkat penyaluran kredit konsumsi di kisaran Rp 40 Triliun hingga Rp 60 Triliun.

Sebaliknya, provinsi dengan penyaluran kredit konsumsi di bawah Rp 30 Triliun, seperti Aceh, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan volume premi asuransi jiwa terendah yang berada di bawah Rp 1.000 Miliar. Rendahnya angka ini mengindikasikan adanya *insurance gap* atau kesenjangan proteksi pada sektor konsumsi di wilayah-wilayah penyangga ekonomi tersebut. Secara keseluruhan, data tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan industri asuransi jiwa di Sumatera sangat bergantung pada *appetite* perbankan daerah dalam mendukung ekspansi kredit konsumsi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data kondisi ekonomi regional dan kinerja perasuransian, serta keterkaitannya, maka kesimpulan yang diambil, yaitu:

1. Terdapat dikotomi yang jelas dalam penggerak ekonomi di Sumatera. Provinsi Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan digerakkan oleh permintaan domestik (konsumsi rumah tangga >60% PDRB), sementara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau digerakkan oleh sektor industri dan ekspor komoditas yang tecermin dari rendahnya pangsa konsumsi terhadap PDRB.
2. Pola konsumsi masyarakat Sumatera mulai bergeser ke arah modernisasi seiring meningkatnya tenaga kerja formal, terutama di Provinsi Kepulauan Riau (60%+) dan Riau. Namun, ketergantungan pada sektor informal masih membayangi provinsi yang berada daratan Sumatera yang memengaruhi stabilitas daya beli jangka panjang dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas global.
3. Keterkaitan Indikator Makro dengan Industri Asuransi:
 - a. Pertumbuhan premi asuransi umum berkorelasi positif dengan wilayah yang memiliki basis tenaga kerja formal tinggi dan struktur ekonomi industri (Sumatera Utara dan Riau).
 - b. Realisasi klaim syariah di Aceh menunjukkan bahwa faktor sosiokultural (regulasi syariah) merupakan variabel yang lebih dominan dalam menggerakkan aktivitas asuransi dibandingkan indikator ekonomi makro semata.
 - c. Terdapat potensi besar pada lini asuransi kerugian di wilayah dengan konsumsi rumah tangga tinggi, serta lini asuransi syariah yang sangat potensial dikembangkan lebih lanjut di Aceh dan wilayah daratan Sumatera lainnya.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja asuransi, yaitu:

1. Untuk wilayah Konsumsi Tinggi (Lampung/Bengkulu) fokus pada produk asuransi ritel yang melindungi aset konsumtif masyarakat.
2. Untuk wilayah Industri Tinggi (Riau/Kepri) fokus pada produk asuransi korporasi, pengangkutan barang (marine cargo), dan perlindungan tenaga kerja formal.
3. Melihat keberhasilan asuransi syariah di Aceh, pelaku industri perlu memperluas ekosistem asuransi umum syariah ke provinsi dengan karakteristik sosiokultural serupa di Sumatera untuk menangkap peluang pasar yang belum tergarap (untapped market).

4. Provinsi Riau dan Jambi bergantung pada sektor komoditas sehingga perusahaan asuransi dapat mengembangkan produk yang melindungi fluktuasi risiko di sektor perkebunan dan pertambangan guna menjaga stabilitas bisnis regional saat harga pasar global bergejolak.

Ringkasan Strategi Industri Asuransi di Provinsi pada Pulau Sumatera

Provinsi	Kondisi Makro	Peluang	Tantangan	Rekomendasi Aksi / Produk
Aceh	- Dominasi Pertanian (32,74%); - PDRB stabil; - Kemiskinan tinggi (12,22%). - Basis usia muda (0-14 tahun) sangat lebar.	- Ekonomi Syariah, Hilirisasi Pertanian & Asuransi Pendidikan.	- Rasio Klaim Jiwa sangat tinggi (171,93%); - Kepatuhan Qanun LKS; - Beban ketergantungan muda.	Fokus pada Asuransi Mikro Syariah & Penataan ulang <i>underwriting</i> jiwa.
Sumatera Utara	- Ekonomi terdiversifikasi (Dagang & Industri); - Pengangguran rendah (5,32%). - Puncak Bonus Demografi (Usia 20-39 tahun).	- Asuransi Korporasi, Kesehatan Karyawan & <i>Insurtech</i>.	- Saturasi pasar tinggi; - Kerentanan inflasi retail; - Konsumerisme usia muda.	Produk asuransi kumpulan industri & digital retail untuk milenial.
Sumatera Barat	- Kemiskinan rendah (5,31%); - Kuat di Perdagangan & UMKM. - Struktur ekspansif stabil (Keluarga Muda).	- Asuransi Properti UMKM & Asuransi Jiwa/Pendidikan Syariah.	- Rasio Klaim Umum tinggi (79,93%); - Risiko bencana alam; - Literasi keuangan.	Produk paket hemat ruko & mitigasi risiko bencana (Gempa).
Riau	- Dominasi Industri Pengolahan (29,83%); - Ekonomi stabil & makmur. - Kokoh pada usia produktif (20-44th).	- Rasio Klaim Umum terendah (25%) & Asuransi Jiwa Kumpulan.	- Volatilitas komoditas (Sawit/Migas); Gap literasi pekerja kebun.	Ekspansi masif <i>Marine Cargo</i> , Properti Industri & proteksi jiwa pekerja.
Jambi	- Basis Pertanian terkuat (34,49%); - Premi umum eksponensial. - Gembung pada usia produktif dewasa.	- Asuransi Kredit Pertanian & Perlindungan Pendapatan.	- Ketergantungan monokultur; - Kerentanan daya beli petani usia produktif.	Asuransi mikro petani & proteksi penghasilan berbasis komoditas.
Sumatera Selatan	- Ekonomi berimbang; - Pengangguran sangat rendah (3,69%). - Angkatan kerja melimpah & stabil.	- Asuransi <i>Engineering</i>, <i>Suretyship</i> & Dana Pensiun.	- Persaingan tarif (Rasio klaim umum sehat sebesar 37,37%); - Persiapan fase <i>aging population</i>.	Penetrasi ke sektor infrastruktur energi & edukasi persiapan pensiun.
Bengkulu	- Pengangguran terendah (3,41%); - Dominasi Pertanian (30,75%). - Dasar piramida (anak-anak) dominan.	- Pertumbuhan premi tinggi & Klaim Jiwa sangat rendah (33%).	- Rasio Klaim Umum melonjak (78,52%); - Skala ekonomi & beban anak tinggi.	Fokus agresif asuransi Jiwa/Pendidikan & evaluasi asuransi umum.
Lampung	- Hub Logistik; - Industri & Dagang tumbuh kuat. - Transisi gembung di usia produktif muda.	- Asuransi Kendaraan Komersial, Logistik & Jiwa Kredit.	- Risiko kecelakaan transportasi tinggi; - Literasi keuangan petani.	Optimasi asuransi pengangkutan barang & asuransi jiwa digital.
Kepulauan Bangka Belitung	- Kemiskinan rendah (4,77%); - Sejahtera, namun volatil. - Tingginya penduduk usia produktif (25-44 tahun)	- Asuransi Maritim, Aset Wisata & Kesehatan Premium.	- Ketergantungan harga komoditas; - Volatilitas premi; - Risiko logistik laut.	Produk kesehatan segmen menengah ke atas & asuransi rangka kapal.
Kepulauan Riau	- Pusat Industri (41,57%); - Pertumbuhan tertinggi (6,94%). - Gembung ekstrem (Migrasi Produktif).	- Rasio Klaim Umum (20,66%) & Jiwa terendah (57,03%); - <i>Employee Benefits</i>.	- Ketergantungan ekonomi global; - Persaingan internasional & mobilitas pekerja.	Internasionalisasi melalui reasuransi & asuransi korporat besar.

Disclaimer

This study is prepared solely for research, educational, and public policy discussion purposes. All analyses, evaluations, interpretations of data, and conclusions presented herein constitute research work prepared by an IFG employee as part of IFG's research activities, based on data and information available at the time of writing.

This publication expressly does not constitute, either directly or indirectly, a basis for making investment decisions, financial transactions, business judgments, or any other economic actions by any individual, institution, or entity. No part of this document should be interpreted as investment advice, a solicitation to buy, sell, or hold any financial instrument, or as professional guidance in financial, legal, or tax matters. This document does not constitute a prospectus or other offering document. The information contained in this document is general in nature and should not be construed as advice, given it has been prepared without taking into account the objectives, financial situation, or needs of any particular person.

This publication is prepared by an IFG employee using data, information, and materials owned by or available to IFG. The views and analysis expressed herein are presented in the author's professional capacity as an IFG employee for research and knowledge-sharing purposes, and do not necessarily constitute or represent IFG's official views, institutional positions, understandings, or policy stances, unless explicitly stated otherwise.

IFG and the author hereby explicitly disclaims any and all liability for financial losses, damages, legal claims, or other consequences arising, whether directly or indirectly, from the use of this publication as a reference for decision-making purposes. Any reliance placed on the contents of this study is strictly at the reader's own risk. Any statements made herein speak only as of the date they are made, IFG and the author assumes no duty to, and does not undertake to, update those statements in the event of any changes to data, information, market conditions, regulations, or other circumstances in the future.

All data and references used in this study are derived from publicly available sources, official publications, and secondary materials deemed credible at the time of writing. However, the IFG and the author makes no representations or warranties, whether express or implied, regarding the accuracy, completeness, or continued validity of such information, and shall not be liable for any damages arising from any person's reliance on this information.

Indonesia Financial Group (IFG)

Indonesia Financial Group (IFG) adalah BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askkrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa, PT Graha Niaga Tata Utama, dan PT Asuransi Jiwa IFG. IFG merupakan holding yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia Financial Group (IFG) Progress

The Indonesia Financial Group (IFG) Progress adalah sebuah Think Tank terkemuka yang didirikan oleh Indonesia Financial Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran progresif untuk pemangku kebijakan, akademisi, maupun pelaku industri dalam memajukan industri jasa keuangan.



(+62) 021 2505080



PT Bahana Usaha Indonesia



Indonesia Financial Group



@indonesiafinancialgroup



@ifg_id



PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190